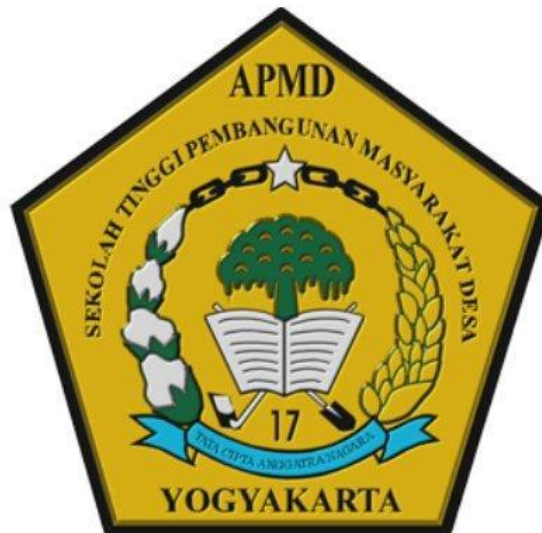


***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM *SMART VILLAGE* DI
KALURAHAN SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

HARIS MANDALA PUTRA

NIM: 19520094

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SMART VILLAGE DI
KALURAHAN SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN, BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

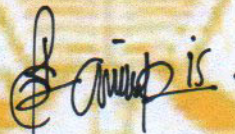
SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:



HARIS MANDALA PUTRA

NIM: 19520094

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum’at
Tanggal : 07 Juli 2023
Waktu : 08.30-09.45 WIB
Tempat : Ruang Ujian STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. **Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Ketua Penguji/Dosen Pembimbing

2. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si**
Penguji Samping I

3. **Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si**
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Mandala Putra

Nim : 19520094

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Program *Smart Village*, Penelitian Kualitatif di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah di sebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Peneliti,



Haris Mandala Putra

19520094

KATA PENGANTAR

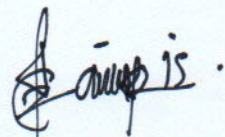
Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana setrata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Mohamad Firdaus, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Hastowiyono, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membantu, memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika STPMD "APMD" Yogyakarta.
7. Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Kalurahan Srimulyo yang telah memberikan tempat dan waktu untuk peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023
Peneliti,



Haris Mandala Putra
19520094

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

Belajar tanpa berpikir tidak adanya gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya.

(Ir. Soekarno)

“Kita dilahirkan dari rahim yang kuat, jika ingin menang jadilah kompetitor handal dan taklukkan setiap perubahan.”

(Haris Mandala Putra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Abdul Salam dan Ibu Siti Marifang tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan atas keberhasilan saya. Berkat do'a restu, dukungan moril dan materil merekalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudaraku; Alia Safira, Nurdianti, Fiki Ramdhani, Indah Permaisuri yang selalu memberikan dukungan motivasi, semangat dan materil bagi keberhasilan saya selama studi serta seluruh keluarga besar Kenari yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Bapak Muskan dan Ibu Jemari selaku bapak dan ibu angkatku yang telah memberikan dukungan materil serta memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kembali ke tanah kelahiran.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 terima kasih atas dinamika dan dialektika yang membangun selama perkuliahan dan untuk *Aliftah Titis Kusumawardani* terima kasih telah menemani, membantu dan memberikan semangat, kesabaran dengan cinta kasih untuk saya.
7. Kepada keluarga besar IKMMIKOM-Y terima kasih karena telah menjadikan saya keluarga dan pemimpin, serta memberikan pengertian untuk saya seberapa pentingnya keluarga bagi diri saya yang ada dalam wadah kekeluargaan ini, sehingga pengalaman serta ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan disini saya berharap dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin .

8. Kepada keluarga besar UKMI STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman dan ilmu bagi saya selama berdinamika.
9. Kepada keluarga besar GMNI Yogyakarta, terlebih khusus Komisariat GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta terima kasih bung dan sarinah serta alumni yang telah mengajarkan saya untuk mengembangkan pemikiran dengan merdeka, belajar kritis dan menghargai setiap pandangan yang ada, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Merdeka...
10. Dan karya sederhana ini penulis persembahkan untuk segenap sahabat, teman dan adik-adik seperjuangan yang bertanya “kapan sidang? dan tutor cepat sidang dong kak!” ; Reza Fadilah Damarjati, Muhamad Amin, Donartus, Eldiwira, Bernardus B. Lede, Sarinah Diana, Yosa Miranda, Bung Taufik, Bung Ikar, Bung Verlin, Iren, Wela, Tika, Lala, Intan Santika, Ria Hasin, Anti, Hendra, Yadi, Ikram, Ansarudin, Sarinah Nur, Galuh Kusuma, Sri Yulanda, Bung Rinus, Bung Sandi, Itha, Indra Kirana, Bung Adio, Bung Muis, Erwin Rangga Brani, Ismail, Ikhsan, Zainal dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Literatur Review	11
G. Kerangka Konseptual.....	20
1. <i>Smart Village</i>	20
2. <i>Governance</i>	26
3. <i>Collaborative Governance</i>	27
H. Metode Penelitian	29
1. Teknik Pengumpulan Data.....	32
2. Teknik Analisis Data.....	36
3. Teknik Penyajian Data.....	37

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN SRIMULYO	39
a. Profil Kalurahan Srimulyo	39
b. Pemerintahan Kalurahan	40
c. Aspek Geografis.....	48
d. Aspek Demografis	53
e. Sarana dan Prasarana Umum	60
f. Kondisi Ekonomi	63
g. Keadaan Sosial.....	68
h. Sistem Informasi Kalurahan Srimulyo.....	71
 BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	 77
A. Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Smart Government</i>	80
B. Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Smart Community</i>	114
C. Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Smart Environment</i>	130
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Program <i>Smart Village</i>	145
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 150
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
 DAFTAR PUSTAKA	 154
 Lampiran-lampiran	 158

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan	31
Tabel 2. Lurah Kalurahan Srimulyo	39
Tabel 3. Data Personil Perangkat Desa.....	46
Tabel 4. Daftar Anggota BPD.....	47
Tabel 5. Batas-Batas Wilayah.....	49
Tabel 6. Penggunaan Lahan	50
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	55
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	56
Tabel 10. Lulusan Pendidikan Umum	59
Tabel 11. Sarana dan Prasarana	60
Tabel 12. Seni dan Budaya	61
Tabel 13. Potensi Wisata.....	62
Tabel 14. Perkiraan Pendapatan Desa.....	65
Tabel 15. Perkiraan Belanja Desa.....	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Konsep Dasar <i>Smart Village</i>	22
Bagan 2. Aktor Governace.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kalurahan Srimulyo terlampir	49
Gambar 2. Peta Pengembangan Potensi Srimulyo terlampir	126
Gambar 3. Pembuatan Spot Wisata terlampir	131
Gambar 4. Potensi terlampir	134

INTISARI

Desa cerdas (*smart village*) adalah inisiatif Kemendes PDTT RI yang digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Kehadiran desa cerdas diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasikan pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat lokal. Penghambat dalam pelaksanaan *smart village* dengan sarana pemanfaatan teknologi informasi yang masih adanya SDM dan Pokmas yang kurang mengerti teknologi sehingga SDM yang mampu *entry* data masih terbatas, masih ada masyarakat yang kurang sungguh-sungguh berpartisipasi misalnya enggan segera menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Selain itu, pemerintah juga kurang melakukan bimbingan yang berhubungan dengan teknologi informasi terhadap masyarakat desa sehingga masyarakat kurang memperhatikan bagaimana upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat dalam mengoperasikan program *smart village*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara; 1). Observasi, 2). Wawancara, dan 3). Dokumentasi 4. Triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposif, yang terdiri dari Pemerintah Desa, swasta, kader pemberdayaan, masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa, kelompok masyarakat dan masyarakat. Analisis data dengan reduksi data, data display, *verification* dan investigasi. Lokasi penelitian di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan desa yang berbasis digital Pemerintah Kalurahan Srimulyo telah menggagas beberapa inovasi pelayanan sebagai wujud dari *smart government* dalam bentuk aplikasi guna mempermudah masyarakat untuk bagaimana kemudian memperoleh sumber informasi yang berkaitan dengan pemerintahan atau juga berkaitan dengan kewilayahan desa. Pelaksanaan *smart village* melalui mekanisme kolaborasi yang juga telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam wujud disiplin *smart community* sebagai tombak dasar untuk kemudian pemerintah desa dapat menggagas kebijakan-kebijakan seperti *one padukuhan one product* yang mampu membawa suatu perubahan kreatifitas dalam masyarakat desa, dan melihat dari sisi pemanfaatan lingkungan atau pelaksanaan *smart environment* sebagai wujud dari *smart village* yang mana Pemerintah Desa dalam pemberdayaan keadaan sosial dan lingkungan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa setelah terpetakan secara komprehensif dengan melihat potensi yang ada dengan mekanisme pemanfaatan media desa untuk mengelola potensi dalam wujud digital agar dapat mendatangkan wisatawan agar potensi yang sedemikian banyak dapat menjadi salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Desa (PAD).

Kata kunci: *Collaborative Governance, Smart Village, Pemerintah Digital.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Smart village merupakan suatu konsep desa pintar dengan maksud desa yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. *Smart village* dalam konteks ini digagas dan berorientasi lebih kepada peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam hal pengembangan pengelolaan desa dan inovasi kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Penerapan *smart village* saat ini masih belum banyak di terapkan pada khususnya daerah Desa, karena pada perkembangannya internet belum sepenuhnya mampu untuk akses masyarakat maupun oleh instansi pemerintah terkhususnya pemerintah desa yang masih mengalami kendala penyebaran jaringan yang sepenuhnya belum memadai, dan hal ini kemudian mampu menopang segala bentuk kinerja pemerintah maupun masyarakat dalam mengakselerasikan kebutuhan melalui jalur teknologi. Dengan kata lain hanya ada beberapa desa yang kerap kali sudah mampu mendorong sumber daya manusianya untuk kemudian melakukan transformasi dari pelayanan manual menjadi pelayanan serba teknologi. Konsep ini pada dasarnya menuntut perubahan melalui penerapan teknologi berbasis *smart government* yang kemudian dituju pada pemerintah desa untuk mendesain segala sisi pelayanan yang menggunakan pelayanan berbasis teknologi atau digital *government*.

Desa cerdas (*smart village*) adalah inisiatif Kemendes PDTT RI berbasis komunitas yang digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang di integrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Kehadiran desa cerdas diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasikan pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat lokal. Hal penting yang harus diperhatikan adalah tidak hanya dari sisi undang-undang untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi juga mengingat perkembangan digitalisasi saat ini yang berpengaruh besar bagi perkembangan desa, terutama terhadap pola perilaku masyarakat. Salah satu cara untuk mengantisipasi pengaruh tersebut adalah dengan menciptakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui pembentukan desa cerdas.

Untuk menuju *smart village* tidak hanya terpaku pada penggunaan teknologi tetapi juga bagaimana teknologi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam momentum perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemerintah harus mampu mendudukan desa dalam konteks yang sebenarnya dan untuk supaya desa mampu mendorong pembangunan secara merata menuju kemandirian dan kesejahteraan desa dengan menggunakan konsep desa pintar sebagai acuan pengembangan atas perkembangan teknologi.

Membangun desa dengan penerapan *smart village* tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu lebih kepada bagaimana konsep ini mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat.

Selain itu, kunci dari suksesnya penerapan *smart village* adalah dengan menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan

keterampilan. Dengan adanya *smart village* ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumber daya desanya secara efektif, efisien, dan sustainable.

Pada prinsipnya pemerintah pusat kerap menghadirkan konsep baru untuk bagaimana supaya desa mampu dan dituntut untuk bersejahtera. Hal ini bukan atas dasar kemampuan yang dimiliki desa melainkan kehendak pemerintah untuk menselaraskan perkembangan dengan kemajuan suatu desa yang menjadi locus pembangunan. Sehingga problematika dengan hadirnya konsep ini yaitu akan mempengaruhi perkembangan desa dengan hadirnya hal baru yang itu membutuhkan waktu bagi SDM pemerintah dan masyarakat dalam sinergi adaptasi yang kemudian dampak bagi hal ini desa sudah berbeda arah atau nilai dalam artian desa yang sebenarnya. Pada dasarnya hakekatnya pemerintah itu adalah memberikan pelayanan dan perlindungan, artinya bahwa sebagai pemerintah itu harus berhubungan langsung dengan masyarakat. Akan tetapi dengan hadirnya konsep ini menjauhkan desa dengan masyarakat, desa dijadikan sebagai *locus* agenda pemerintahan tetapi dalam penyelenggaraanya tentunya desa membutuhkan kesiapan yang matang untuk menerima kehendak pemerintah untuk memajukan desa secara digitalisasi.

Dengan demikian, hal ini tentunya akan mempengaruhi hubungan emosional masyarakat dan pemerintah desa menuju suatu perkembangan desa serta nilai atau culture budaya yang sama-sama kita ketahui bahwa budaya dalam masyarakat dan antara Pemerintah Desa mengedepankan pelayanan dan perlindungan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. *Digital government* atau *smart village* itu menjauhkan desa dengan masyarakat dalam model pengembangan program yang mengedepankan teknologi yang yang berbasis online atau komunikasi dalam jaringan antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Dalam perkembangannya, konsep desa cerdas (*smart village*) ialah sebagai cikal bakal bagaimana mengubah desa-desa di Indonesia menjadi lebih siap menyosong masa depan. Internet adalah sarana untuk mencapai kemajuan tersebut. Menteri desa PDTT merancang konsep ini sebagai sarana pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi desa diharapkan untuk bisa melakukan berbagai capaian atau terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori desa mandiri dan berkembang.

(Permana, n.d.) juga mengungkapkan bahwa kebutuhan hidup manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam, seperti energi dan bahan bangunan. Namun, seringkali tindakan pemanfaatan sumber daya alam ini memberikan dampak yang tidak dapat diterima oleh alam, apalagi dengan jumlah populasi manusia yang berkembang pesat dan kemajuan teknologi yang makin canggih. Hal ini mempercepat penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya siklus ekosistem. Proses membangun bangunan, sarana, dan prasarana yang berfungsi sebagai wadah berlindung dan beraktivitas bagi manusia sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Dari pernyataan diatas peneliti dapat mengambil suatu benang merah bahwasannya program *smart village* menghendaki Desa untuk maju dari berbagai sisi, akan tetapi memungkinkan sekali bahwa kualitas desa akan menurun jika tidak ada suatu tindakan intensif dari pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap keadaan lingkungan masyarakat ditengah perkembangan teknologi yang membutuhkan perlindungan secara berkala.

(Herdiana, 2019) juga berpendapat mengenai konteks pengembangan *smart city* di Indonesia, menempatkan berbagai elemen yang terdiri dari *smart economy*, *smart infrastructure*, *smart governance*, *smart environment*, *smart living* dan *smart people* sebagai unsur yang mendorong terwujudnya penerapan *smart city*.

Keberfungsian elemen-elemen tersebut menjadi dasar keberhasilan penerapan *smart city*. Elemen-elemen tersebut harus memiliki prakondisi kesiapan yang sama dalam adopsi teknologi informasi. Dalam praktiknya, *smart city* lebih menekankan kepada pendekatan top-down, dalam artian adanya otoritas untuk mendorong dan menekan elemen-elemen yang ada untuk menjalankan fungsinya sesuai peran yang telah disusun dalam konsep *smart city*, yaitu institusi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Implikasinya kepada peran pemerintah sebagai regulator yang menetapkan instrumen keberfungsian elemen-elemen *smart city* tersebut, pemerintah pula dengan instrumen kebijakan yang dimilikinya harus memastikan adanya aturan yang rinci, kaku dan instruksional agar semua elemen mampu bersinergi mewujudkan kolektivitas dan integrasi.

Pengembangan *Smart Village* dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter serta norma yang ada di dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai *customer* dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka *smart village*. Alasan lainnya, yaitu dengan adanya identifikasi secara mendalam terhadap berbagai nilai, karakter dan norma yang ada, maka akan menentukan ukuran dari teknologi informasi yang akan dipergunakan, mengingat adopsi teknologi informasi dalam praktiknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, pada akhirnya diharapkan akan terjalin kesesuaian antara nilai, karakter, norma dan masalah dengan teknologi informasi dalam pengembangan *smart village*. Dari pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tujuan pengembangan *smart village* jika dibandingkan dengan *smart city*. Penyesuaian

teknologi informasi dengan nilai, karakter dan norma yang ada di desa akan mampu menciptakan sinergitas di antara keduanya dan akan mampu mewujudkan pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi.

Kalurahan Srimulyo merupakan salah satu Desa yang ada di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dan kemudian telah ditempatkan untuk merancang bagaimana skema penyelenggaraan pemerintah desa melalui program dengan konsep *smart village*. Ada suatu program yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Srimulyo yaitu penerapan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan (SIAP) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masyarakat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program PTLS.

Di balik kesuksesan suatu produk kebijakan di pemerintah pusat maupun pemerintah desa sudah tentu akan mengalami hambatan-hambatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PTLS dengan aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yaitu masih adanya SDM dan Pokmas yang kurang mengerti teknologi sehingga SDM yang mampu entry data masih terbatas, masih ada masyarakat yang kurang sungguh-sungguh berpartisipasi misalnya enggan segera menyelesaikan kekurangan berkas yang kurang. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana lebih tidak diperhatikan untuk mendukung percepatan PTLS, selain itu pemerintah kurang melakukan bimbingan yang berhubungan dengan teknologi informasi terhadap masyarakat desa sehingga masyarakat kurang memperhatikan bagaimana upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat dalam dalam mengoperasikan program komputer sehingga percepatan PTLS tidak merata. Hal ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah desa dalam peningkatan SDM masyarakat, jika tidak diperhatikan maka program pemerintah lainnya yang

membutuhkan keterlibatan masyarakat akan sangat tidak efektif dalam pengimplementasiannya (Cahyono et al., 2020).

Pertengahan juni tahun 2017 disusun sebuah aplikasi e-Lastris (Elektronik Layanan Administrasi Tanpa Antri) di Kalurahan Srimulyo dengan harapan mampu memberikan layanan administrasi kepada masyarakat tanpa perlu antri. Tujuan utama di buat aplikasi e-Lastris adalah untuk warga srimulyo yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pelayanan secara ke Balai Desa, dan sasaran utama e-Lastris yakni warga yang memiliki mata perkajaan sebagai pegawai. (Ii & Penelitian, 2017)

Dalam aplikasi e-Lastris terdapat beberapa bentuk pelayanan seperti surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, permohonan akte kematian, surat pengantar ktp, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan duplikat akte nikah, surat pengantar nikah, surat keterangan pindah penduduk, surat keterangan menjadi penduduk, permohonan akte kelahiran, surat pengantar cerai, serta surat pengantar skck. e-Lastris merupakan inovasi Kalurahan Srimulyo dalam halnya tentang pelayanan publik dan dalam bidang administrasi pemerintahnya.

Semakin pesatnya teknologi saat ini menjadikan segala urusan beralih menuju sistem digital atau online, menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Kalurahan Srimulyo agar tetap mengikuti perkembangan teknologi digital. Seiring berjalannya waktu aplikasi e-Lastris merupakan sebuah jawaban dari inovasi sebuah pelayanan publik yang menggunakan sistem online. Dimana para penerima pelayanan tidak perlu bersusah-susah untuk datang ke Balai Kalurahan dan melakukan urusan surat menyurat. Namun, tidak terpungkiri dengan adanya sistem pelayanan administrasi publik secara online mengharuskan Pemerintah Kalurahan Srimulyo memberikan ketegasan kepada operator supaya mengerti cara mengaplikasikannya aplikasi e-

Lastri. Hal tersebut dirasa sangat penting karena nantinya operator yang berhadapan langsung kepada masyarakat pengguna e-Lastri.

Oleh karena itu, Kalurahan Srimulyo yang kemudian pada tahun 2021 menerapkan konsep *smart village* dalam keberlangsungan roda pemerintahan desa ini sekiranya mampu menopang kedudukan desa dari berbagai sektor agar tidak terjadi disintegrasi pada desa. Kemudian, desa juga harus dibekali kemampuan secara SDM melalui peningkatan kinerja pemerintah desa untuk masyarakat sebagai subjek pembangunan yang lebih intensif. Karena untuk menuju kesejahteraan desa yang utuh serta berdaulat dengan adanya aktor yang berperan yaitu pemerintah dan masyarakat desa yang akan saling memberikan dorongan untuk membangun suatu desa tanpa adanya intervensi yang menjatuhkan desa dalam melakukan pembangunan secara fisik maupun non-fisik.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menuju pembangunan suatu desa perlu melakukan pembangunan desa dengan membutuhkan partisipasi yang melibatkan pihak lain, masyarakat terbuka dan Pemerintah Desa yang inklusif, yang dapat menerima partisipan dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Desa dalam hal ini memiliki kontribusi untuk bagaimana mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo selama penerapan program *smart village* dengan menghadirkan masyarakat desa dengan tujuan pengembangan pengetahuan tentang teknologi untuk kemajuan menuju kesejahteraan suatu desa.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo sebagai bentuk implementasi kebijakan dalam penerapan program desa, ini kemudian akan dideskripsikan segala bentuk fenomena yang terjadi dan mewarnai roda Pemerintahan Desa Srimulyo dalam

mendudukan persoalan pada penerapan konsep *smart village* terhadap kesejahteraan Kalurahan Srimulyo. Dengan itu, berangkat dari persoalan inilah peneliti akan menggali berbagai informasi yang komprehensif berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab berbagai fenomena setelah penerapan *smart village* sebagai sarana pembangunan dan pengembangan desa berbasis penerapan teknologi.

Dengan menggunakan perspektif *governance* (G-4) sebagai pisau analisis dari permasalahan diatas. *Governance* sebagai konsep yang tepat untuk menggali berbagai informasi terkait kesiapan pemerintah secara kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola serta mendeklarasikan suatu kebijakan melalui program *smart village* dalam tata pemerintahan desa dan kemudian melihat bagaimana interaksi pemerintah dengan non pemerintah dalam artian masyarakat dalam pengimplementasian program *smart village*. Dengan perspektif ini juga peneliti akan melihat sejauh mana Pemerintah Desa sebagai pelaku atau otoritas dalam mendudukan suatu persoalan yang berkaitan dengan roda pemerintahan desa atas keputusan melaksanakan serta merancang alur pengembangan desa melalui penerapan program *smart village* di Kalurahan Srimulyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana *collaborative governance* dalam pelaksanaan program *smart village* di Kalurahan Srimulyo?

C. Fokus Penelitian

Inisiatif Desa Cerdas (*Smart Village*) ini penting tidak hanya dari sisi undang-undang untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi juga mengingat perkembangan digitalisasi saat ini yang berpengaruh besar pada perkembangan desa,

terutama terhadap pola perilaku masyarakat dan kapasitas serta kapabilitas pemerintah desa yang diciptakan untuk membentuk desa cerdas. Ada beberapa pilar yang kemudian difokuskan pada penelitian yaitu:

1. *Smart Government*
2. *Smart Community*
3. *Smart Environment*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti terkait penerapan Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana *Governansi* Program *Smart Village* dalam suatu desa di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I.Y.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam akademis baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kelangsungan akademis yang terus berkembang dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan, yaitu membuat inovasi pengkajian dalam peningkatan kemampuan sains mahasiswa/siswa
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Governansi Program Smart Village* di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, D. I. Y, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, manfaat ini memperoleh wawasan dan pengalaman langsung tentang cara melihat fenomena perkembangan serta pembaharuan terhadap suatu lingkungan pemerintah desa dan masyarakat desa.
- b. Bagi akademisi, penelitian bermanfaat untuk membuka ruang-ruang pembelajaran yang sistematis dengan pengkajian secara historis tentang suatu dinamika perkembangan pada suatu roda pemerintahan desa.
- c. Bagi pemerintah, manfaat dari hasil penelitian dapat mempertimbangan setiap agenda program yang akan di realisasikan kepada pemerintah desa. Sehingga dalam menentukan suatu agenda ini mampu menemukan suatu metode berpikir secara praktis dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini mempunyai manfaat untuk dapat membantu memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dirancang oleh sebuah instansi atau pemerintah maupun kelompok masyarakat.

F. Literatur Review

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian. penelitian yang disajikan sebagai bahan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Permana (2011) dalam jurnal *Arsitektur KOMPOSISI*, Vol 9, Tahun 2011 berjudul *Perancangan Smart Village Sebagai Local Genius Arsitektur Nusantara*, menjelaskan tentang kebutuhan hidup manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam, seperti energi dan bahan bangunan. Namun, seringkali tindakan pemanfaatan sumber daya alam ini memberikan dampak yang tidak dapat diterima oleh alam, apalagi dengan jumlah populasi manusia yang berkembang pesat dan kemajuan teknologi yang makin canggih. Hal ini mempercepat penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya siklus ekosistem. Tujuan dari penelitian ini melihat proses membangun bangunan, sarana, dan prasarana yang berfungsi sebagai wadah berlindung dan beraktivitas bagi manusia sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya (Permana, n.d.)

Jika dilihat dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti mempunyai perbedaan yang dapat di kategorikan sangat fundamental. Penelitian diatas hanya mendeskripsikan bagaimana konsep dapat berperan penting dalam keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan yang terstruktur melalui komponen program konsep *smart village*. Sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti untuk mengembangkan konsep berpikir yang konstruktif dari pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks kapasitas dalam mengatur dan mengelola keberlangsungan pembangunan yang mendukung dalam pengimplementasian program *smart village*.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rini Rahmawati (2018) dalam jurnal Sistem Cerdas, Vol 01, Tahun 2018 yang berjudul *Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency*, menjelaskan pembangunan desa berbasis *Information and Communication Teknologi (ICT)* nampaknya bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini tentunya akan sangat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah pedesaan. Sistem informasi desa yang siap digunakan dan dioperasikan oleh perangkat desa selama koneksi internet yang ada di desa tersedia dalam kondisi stabil. Sistem yang telah dibangun tersebut tentunya sangat bermanfaat sekali dalam pembangunan desa dan mendukung pada implementasi *smart village*, namun demikian perlu dievaluasi apakah seluruh desa yang ada di Indonesia telah dapat mengakses dan terhubung kedalam sistem informasi tersebut (Rachmawati, 2018)

Pada penelitian diatas mendeskripsikan bagaimana mengembangkan *konsep smart village* melalui penguatan informasi desa untuk suatu pelayanan yang beroperasi secara stabil. Tentunya sedikit persamaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian yang akan saya teliti bagaimana untuk mengembangkan lagi dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam menopang governansi program *smart village* dalam pelayanan dan pembangunan untuk suatu kemandirian dan kesejahteraan dalam artian sebenarnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadian dan Tony Dwi Susanto (2022) dalam jurnal Information System, Hospitality and Technology, Vol 04, Tahun 2022 yang berjudul *Pengembangan Model Smart Village Indonesia*, menjelaskan bahwasannya desa pintar saat ini menjadi salah satu alternatif pembangunan desa yang berpotensi mengatasi permasalahan desa. Karena dalam kajiannya, inisiatif untuk melaksanakan pembangunan desa dapat dilakukan dengan pendekatan smart

rural atau pendekata desa pintar. Hal ini tentunya berdasarkan dan atau tergantung keadaan dan kebijakan masing-masing daerah. Namun dalam pengimplementasiannya konsep *smart village* dan *smart city*, aspek kewilayahan perlu diperhatikan, karena kondisi, permasalahan, dan kecapatan pembangunan di setiap wilayah berbeda. Kemudian mengatakan *smart village* bisa memperbaiki kondisi daerah, namun ketika membangun *smart village* penting untuk mengetahui dasar-dasar program *smart village*. Hal ini dikarenakan program desa pintar tidak dapat dilaksanakan tanpa mengetahui landasan atau mempersiapkan landasan yang kokoh (Hadian & Susanto, 2022).

Pada penelitian yang telah dilakukan ini dapat ambil suatu kesimpulan bahwa peneliti hanya mendeskripsikan bagaimana manfaat dengan governansi program smart village untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi suatu daerah khususnya desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan diteliti yaitu bagaimana pemerintah desa mampu membaca situasi dalam merealisasikan setiap agenda pemerintahan yang mempunyai hubungan baik secara vertikal menuju horisontal. Sehingga dengan adanya kematangan secara konsep pemerintah dapat meminimasilir setiap pengrealisasian program yang bermanfaat untuk masyarakat desa.

4. Selanjutnya dalam penelitian Saffa Annisa, Ahmad Wahyu Rosyadi, Ahmad Amil Mukhtar, Ahmadi Mahrus, Ali Mohamad Al Amin (2020) dalam jurnaln IKRA-ITH Informatika, Vol 4, Tahun 2020 berjudul *E-Commerce Desa Dalam Upaya Menuju Smart Village; Studi Analisa dan Perancangan*, menjelaskan sistem e-commerce ini akan digunakan oleh tiga *end user*, admin desa, *seller*, dan *buyer*. Guna memahami ketiga end user ini merupakan aspek dasar dari e-commerce yang merupakan sebuah sistem penjualan yang dibutuhkan oleh masyarakat

pedesaan. Kemudian, *e-commerce* merupakan langkah awal yang mewakili banyak aspek menuju *smart village*. Analisa dokumen digunakan sebagai kebutuhan fungsional dan non fungsional sangat penting untuk dijadikan sebagai pondasi pembangunan sistem. Sehingga dokumen perancangan akan sangat membantu keseluruhan *stakeholder* untuk menyamakan persepsi dan memiliki gambaran yang utuh terhadap pembangunan sistem. (Assani et al., n.d.)

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penelitian ini hanya mampu menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merealisasikan program *smart village* pada suatu desa. Sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti adalah kesiapan dari pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola program *smart village* agar menjadi suatu program yang tidak melenceng dari roda pemerintahan desa, penelitian yang saya kembangkan bagaimana pemerintah harus memperoleh suatu skema untuk menopang pengimplementasian program *smart village* menuju pembangunan serta pengembangan desa menuju kesejahteraan dan kemandirian desa.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Saputra dan Aulya Rahman Isnain (2021) dalam jurnal Teknologi dan Informasi, Vol 2, Tahun 2021 berjudul *Penerapan Smart Village Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menggunakan Metode Web Engineering*, menjelaskan konsep desa pintar dengan maksud desa yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi *Smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Dikatakannya *smart village* saat ini masih belum banyak diterapkan khususnya di desa, karena di yakini penerapan konsep ini mampu mengola data penduduk yang menjadi salah satu dampak positif dari konsep ini. Sehingga dengan menerapkan konsep ini

mampu mempercepat pendataan serta pengelolaan data yang cepat akses. Hal ini memungkinkan tidak akan terjadi kerusakan data arsip yang diinput secara manual dan kehilangan data serta manipulasi data. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu *web engineering* yang bertujuan untuk menerapkan konsep desa pintar dengan mengelola bagian informasi yang kemungkinan mempunyai urgensi. Sehingga tawaran ini mengemukakan wadah bagi masyarakat untuk mempermudah melihat produk olahan desa serta permohonan surat yang dapat dilakukan secara online. (Teknologi et al., 2021)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat adalah melihat program *smart village* dengan gagasan baru dari pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah desa melalui pelayanan yang terbuka bagi masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan informasi dapat diterima secara konsisten oleh masyarakat.

6. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tia Subekti dan Ratnaningsih Damayanti (2019) dalam jurnal *Public Administration and Local Governance*, Vol 3, Tahun 2019 berjudul *Penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata*, menjelaskan kajian dari berbagai media menunjukkan beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengelola dana desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Misalnya dengan mengelola dana desa melalui pembangunan wisata berbasis BUMDesa seperti Desa Umbul Pongok di Klaten, atau menciptakan ekonomi kreatif desa dengan pemanfaatan jejaring bisnis seperti Desa Tamansari di Banyuwangi. Geliat pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif tersebut pada akhirnya menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep *smart village*. Dijelaskan kajian yang menarik dari *smart village* ada dua hal. *Pertama*, ini merupakan kajian-kajian baru yang

nantinya akan memperkaya kajian-kajian lain tentang desa. Khususnya kajian tentang inovasi desa. *Kedua*, masih banyak ditemukannya *gap* antara kajian teoritis konseptual tentang *smart village* dengan implementasi *smart village* di Indonesia. (Wisata, 2019)

Penelitian ini mempunyai perbedaan yang akan diteliti, penelitian ini hanya menepatkan program *smart village* untuk suatu badan usaha desa supaya dalam diakses secara transparan pengelolaan usaha desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti ialah menggunakan program ini secara merata supaya program ini mendesain agenda-agenda desa yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

7. Kemudian penelitian dilakukan oleh Heni Sulistiani, Agung Saputra, Aulya Rahman Isnain, Dedi Darwis, Yuri Rahmanto, Aprian Nuriansah, Aidil Akbar (2022) dalam jurnal *Technology and Sosial for Community Service*, Vol 3, Tahun 2022 berjudul *Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan Smart Village Guna Meningkatkan Pelayanan Desa*, menjelaskan *smart village* digunakan sebagai pendukung dalam pengembangan *smart district* merupakan suatu pendekatan dalam pemecahan masalah melalui terbukanya akses informasi yang luas. Sehingga dapat meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang efektif dan efisien dengan mengurangi biaya operasional, lebih produktif dan tumbuh dalam wilayah yang berkelanjutan. Dijelaskan juga bahwa penelitian tentang *smart village* masih perlu untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk proses perbaikan kinerja dan melibatkan masyarakat. (Sulistiani et al., 2022)

Pada penelitian ini mempunyai kesamaan yang paling mendasar adalah pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengkayaan kapasitas secara struktural baik untuk masyarakat maupun pemerintahan desa itu sendiri.

8. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Saidah, Lailatul Khasanah, Asriyatuzahra, Siti Ridloah (2021) dalam jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Vol 2, Tahun 2021 berjudul *Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandeng Dalam Mendukung Program Smart Village*, menjelaskan smart village tidak hanya ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melainkan untuk mengintegrasikan seluruh elemen desa menjadi sebuah sistem yang kuat sehingga mampu memainkan peranan penting dalam membantu pencapaian tujuan. Digitalisasi tidak lagi menjadi pilihan tapi sebuah keniscayaan atau keharusan terlebih di masa perkembangan zaman yang semakin pesat. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan. (Saidah et al., 2022)

Pada penelitian ini mengemukakan bagaimana strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah desa dalam mensukseskan kampung digital krandeng. Persamaan pada penelitian yang akan saya teliti adalah mendudukan program smart village bukan semata hanya untuk memudahkan akses bagi masyarakat, melainkan memperkuat elemen desa menjadi sebuah sistem yang mampu membantu pencapaian tujuan, yaitu pencapaian kemandirian dan kesejahteraan desa dari berbagai sektor.

9. Penelitian dari Yanuar Risah Prayogi, Fadilah Fahrul Hardiansyah, Nana Ramadijanti, Ahmad Syauqi Ahsan, Urfiyatul Erifani (2020) dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol 4, Tahun 2020 berjudul *Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa Berbasis Mobile Dengan Konsep Smart Village Di Desa*

Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, menjelaskan dengan adanya aplikasi website pegantenan smart village memudahkan administrator desa dalam mengelola dan menyimpan data-data desa (Pamekasan, 2020).

Tujuan dari penelitian mereka bagaimana aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai media untuk menyampaikan berbagai layanan desa dan informasi kepada masyarakat. Kemudian memudahkan perangkat desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa dengan adanya laporan dari masyarakat serta saran dan aspirasi, laporan terkait keadaan desa, serta pertanyaan masyarakat dapat disampaikan langsung oleh masyarakat desa melalui aplikasi tanpa harus datang ke balai desa. Selain itu masyarakat juga dapat melihat pengumuman yang disampaikan oleh administrator desa.

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, pada penelitian ini hanya mendudukan program smart village untuk suatu kebutuhan pemerintah desa terkhususnya administrator desa. Sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti adalah mendudukan program smart village untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintah desa yang mendapatkan emansipasi dari masyarakat desa, sehingga nilai secara praktis program ini dapat membangun suatu gagasan yang dapat mengantarkan desa menuju capaian secara daulat, sejahtera, mandiri dan terkonseptual.

10. Dalam penelitian Dian Herdiana (2019) dalam jurnal IPTEK-KOM, Vol 21, Tahun 2019 berjudul *Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia*, menjelaskan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, beberapa desa di indonesia mulai mengembangkan smart village. Namun dalam praktiknya belum ada satu kesapahaman mengenai elemen dari smart village,

sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ingin mengupas terkait model pengembangan smart village yang mengkorelasikan dengan berbagai dimensi, seperti sumber daya, institusi dan teknologi menjadi dimensi yang mendasar bagi terlaksananya smart village. Kesamaan pemahaman tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa dalam penerapan teknologi informasi dibutuhkan adanya kapabilitas dari institusi sebagai pemegang otoritas dan dukungan kapasitas sumber daya. (Herdiana, 2019)

Pada penelitian ini hanya menjelaskan terkait pengembangan *program smart village* yang belum mendapatkan kesepahaman mengenai elemen dari konsep program *smart village* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang saya akan teliti yaitu bagaimana pemerintah desa terkhususnya mampu menjawab segala tantangan dari program *smart village* yang telah ditempatkan pada suatu skema penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain penelitian yang akan saya teliti merujuk pada suatu konsep atau governansi program yang telah berlangsung adanya.

G. Kerangka Konseptual

1. *Smart Village*

Desa menjadi hal yang diutamakan oleh pemerintah dalam rangka menentukan suatu kebijakan dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, *smart village* merupakan salah satu cerminan dari konsep *smart city* yang diketahui memiliki cakupan yang luas. Hanya saja perbedaannya terletak pada lokasi penerapannya, dimana *smart village* atau desa pintar ini dilaksanakan pada level desa.

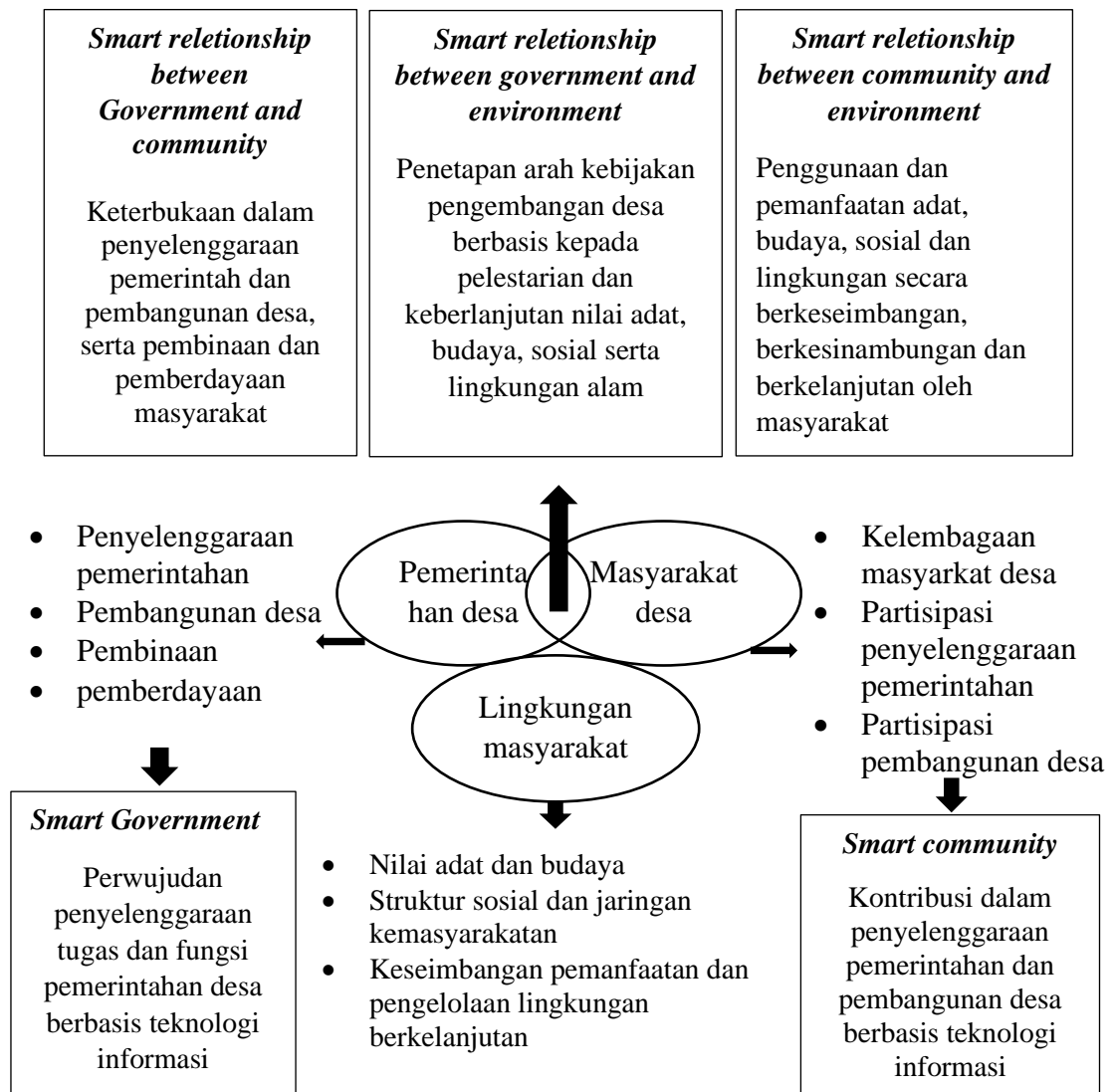
Smart village juga suatu konsep desa pintar dengan maksud desa yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Teknologi informasi dalam konteks *smart village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalinan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan perdesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan perdesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi yang didasarkan atas konsep *smart village*.

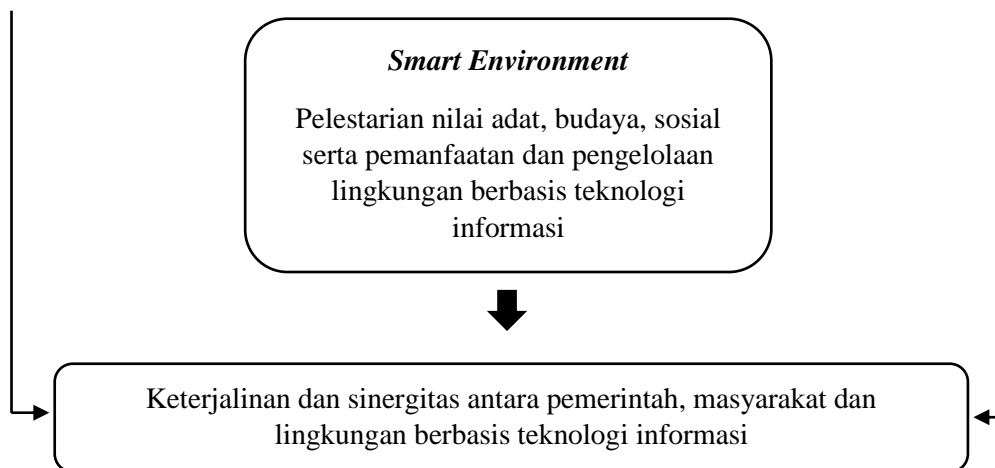
Menurut Hasan (2021) *smart village* merupakan suatu desa yang secara inovatif menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam penerapannya tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga dapat mengembangkan potensi desa dalam berbagai bidang, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis teknologi dan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *smart village* memiliki banyak makna sesuai dengan kebutuhan dalam pemakaiannya, namun *smart village* merupakan suatu alternatif solusi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa tersebut. Sedangkan menurut Herdiana (2019) menjelaskan bahwa konsep *smart village* merupakan konsep desa yang cerdas yang tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi, tetapi mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang berkualitas berbasis informasi.

Menurut Herdiana (2019) terdapat tiga elemen penting dalam *smart village* yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Ketiga elemen

tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan konsep *smart village* yaitu *smart relationship* yaitu keterjalinan konstruktif yang muncul dari ketiga elemen yang bersinergi menjadi satu dengan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun peneliti menemukan suatu hal dalam praktiknya yaitu belum ada satu kesapahaman mengenai elemen dari *smart village*, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam *bagan 1* dibawah ini.

Bagan 1. Konsep Dasar *Smart Village*





Kemudian dibawah ini akan dijelaskan terkait tiga elemen yang menjadi dasar penting dalam pengembangan program *smart village* menurut (Herdiana, 2019);

a. *Smart Environment*

Menurut Herdiana (2019) *smart environment* adalah merupakan suatu pemanfaatan dan cara mengatasi suatu keadaan sosial dan lingkungan yang berbasis teknologi informasi. *Smart environment* merupakan kegiatan pemanfaatan lingkungan alam dan sosial agar dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan menilai dengan menggunakan teknologi informasi.

Herdiana (2019), juga mengungkapkan bahwa lingkungan pedesaan dalam konteks *smart village* tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam yang ada di desa, melainkan keseluruhan elemen yang membentuk satu tatanan sosial dan alam yang mencirikan karakter dari desa. Sehingga ketika dikaitkan dengan konteks *smart village*, pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan baik dalam tatanan lingkungan sosial maupun dalam tatanan lingkungan alam.

b. *Smart Government*

Menurut Herdiana (2019) *smart government* adalah pemerintahan yang cerdas, terbuka, partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan *e-government* yakni pemerintahan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dalam pengelolaan pemerintahannya. *Smart government* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi dan diwujudkan ke dalam 4 fungsi pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dan menjadi alat selain untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu keharusan di mana masyarakat merupakan bagian dari desa yang tidak hanya dijadikan sebagai objek berbagai kebijakan tentang desa, tetapi juga sebagai subjek yang mampu aktif terlibat dan turut menentukan kebijakan tentang desa.

c. *Smart Community*

Smart community adalah masyarakat yang cerdas dalam artian dapat berkontribusi dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. *Smart community* merupakan kontribusi masyarakat ke dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (Herdiana, 2019).

Herdiana (2019), berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam konteks *smart village*. Masyarakat tidak hanya sebagai tujuan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kehendak dan tujuan untuk menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kedudukan dan perannya di desa. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam proses pembangan desa sehingga akan menjadi pihak yang menerima manfaat.

Aspek-aspek keberhasilan diatas memang menjelaskan bagaimana melihat otoritas pemerintah terkait dengan urusan pelayanan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan pelayanan publik mengalami permasalahan diluar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu adanya suatu langkah yang ditempuh dengan mereformasi atau aspek dalam inovasi birokrasi yang lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman yang kini makin modern. *Smart village* memang belum banyak dikemukakan dibandingkan dengan *smart city*. Demikian juga dimensi untuk mengukur *smart village*, dalam uraian ini program *smart village* lebih ditekankan pada pembahasan tentang uraian dan contoh-contoh pengembangan *smart village* melalui program *digital goverment* yang ada dalam suatu instansi pemerintahan.

Diluar keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan publik maka diperbolehkan pemerintah desa untuk bagaimana kemudian menemukan dimensi baru dalam pengelolaan urusan pemerintahan, dengan adanya persoalan-persoalan yang terjadi pemerintah dapat menemukan solusi apabila pemerintah desa secara struktural berjalan sesuai dengan koridor pemerintahan yang lebih inovatif terhadap

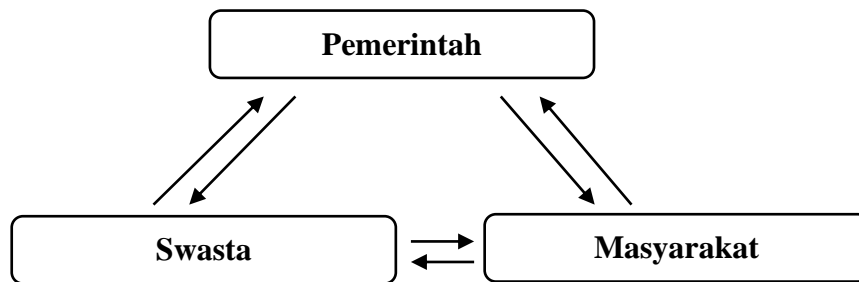
penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini juga dapat membantu memecahkan permasalahan *government* terkait pengelolaan urusan publik yang dapat diuraikan dalam 3 (tiga) indikator, yaitu; Pemerintah Desa, Masyarakat desa dan lingkungannya.

2. *Governance*

Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. (Maryam, 2016)

Governance merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumber daya dan finansial. (Ii, n.d.)

Bagan 2. aktor governance



Bagan diatas kemudian bagaimana memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

3. *Collaborative Governance*

collaborative governance muncul di era paradigma governance, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan

waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal.

Ansel dan Gash (2007: 534) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara berlangsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Defenisi Ansell dan Gash menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasikan oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintahan. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan nada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Salah satu tipe konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, yang kemudian dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses

tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat.

Collaborative governance muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. Munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan mesti didasarkan atas asas yang telah dimiliki oleh desa. Karenanya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan lokal menjadi hal yang wajib dalam melibatkan partisipasi masyarakat baik pikiran, tenaga dan material untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. Partisipasi ini harus disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikomandoi oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa kini bukanlah aktor tunggal atau dominan dalam pemerintahan dengan berinteraksi dengan pihak non pemerintah.

Interaksi antara pemerintah dan kekuatan non pemerintah dalam proses pemerintahan Abidin dkk (Abidin et al, 2013:10) telah memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses interaksi pemerintahan. Tiga

aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi atau berkerjasama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Dengan demikian tahap-tahap pengembangan desa melalui *smart village* dapat petakan secara terstruktur apabila ketiga elemen diatas dapat berkolaborasi dengan baik untuk bagaimana kemudian melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap suatu desa dalam mencapai tujuan bersama menuju masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Deskriptif-kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian di analisis sesuai dengan teori yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dkk (Moleong, 2019:6) yang mendefinisikan, “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

Data yang dikumpulkan adalah tentang “Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo”. Konsep tersebut maka penulis mendapatkan suatu informasi dalam bentuk deskripsi. Selain itu ungkapan konsep tersebut lebih menghendaki makna yang ada dibalik deskripsi data tersebut, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Kemudian data dari peneliti ini telah terkumpulkan dan dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subyek penelitian sehingga mengungkapkan lebih jauh terkait “Governansi Program *Smart Village* di Srimulyo”. Deskripsi informasi atau sajian datanya telah menghindari adanya evaluasi dan penafsiran dari peneliti, karena jika terdapat evaluasi atau penafsiran itu pun harus berdasarkan dan berasal dari subyek penelitian yang diteliti.

b. Unit Analisis

Menurut Patten dkk (2018:71) berpendapat bahwa “*The unit of analysis is simply who or what constitutes one “unit” from which data has been collected in the study*” Unit analisis hanyalah siapa atau apa yang merupakan satu “unit” dari mana data telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Berdasarkan defenisi tersebut maka dapat dikatakan unit analisis adalah kesatuan dari unit pengumpulan data.

a) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

c) Subjek/informan penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *proposive sampling* yaitu dengan mengambil orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri spesifik yang dimiliki sampel itu. *Proposive* diartikan juga teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu itu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berkaitan dengan tema penelitian baik pemerintah desa, masyarakat dan *stakeholders*. Kriteria informan sesuai dengan kebutuhan pendalaman isu atau informasi tertentu yang dapat ditemui di lapangan, berikut datanya.

Berikut data informan yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci berikut deskripsi informan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Informan

No.	Nama	Usia/Thn	Pekerjaan
1.	Drs. Wajiran	60	Lurah Srimulyo

2.	Nurjayanto, S.T	38	Carik
3.	Pardiyono	42	Dukuh Ngelosari
4.	Drs. Suprpta	49	Dukuh Jasem
5.	Dra. Herwin Susilowati	40	Kaur Perencanaan
6.	Sugeng Widoyo, S.Pd.I	39	Kaur Tata Usaha & Umum
7.	Purnomo Tri Raharja, S.E	41	Kaur Pembangunan/jagabaya
8.	Suyanto	52	Ketua BPD
9.	Sumarno	47	Swasta
10.	Edi	39	swasta
11.	Bambang	40	Masyarakat
12.	Nurdiyanto	43	Masyarakat
13.	Sulastri	41	Masyarakat

Sumber: Data Primer 2023

Subjek penelitian di atas dipilih karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di dalam keberlangsungan wawancara sebagai acuan pengambilan data yang sesuai dengan rencana penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan tersebut yang dalam prosesnya masih terbilang data yang di dapatkan belum sepenuhnya tersistematis. Karena dari awal tahap wawancara peneliti menemukan beberapa informan yang tidak sepenuhnya memberikan informasi, persis disini di yakini bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sehingga tahap proses pengambilan data lebih dominan ke Pemerintah Desa sebagai otoritas yang membuat dan menjalankan kebijakan tersebut. Dan kemudian dalam proses analisis hasil wawancara dan juga proses pengambilan data lebih menganalisa apa yang menjadi indikator dijalankannya program dan juga tanggapan seperti apa ketika program dijalankan dalam ranah masyarakat.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari sisi motif kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan yang memungkinkan pengamatan melihat dunia sebagaimana yang dilihat adalah subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap fenomena dari segi pandang dan anutan para subjek pada keadaan saat itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasa apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama dari pihaknya maupun dari luar pihak. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengadakan pengamatan atau observasi lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung terkait Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pengembangan desa, seperti bagaimana keadaan obyketif roda Pemerintahan Desa setelah menetapkan program *smart village* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemudian proses pengelolaan dan pemanfaatan serta cara mengatasi suatu keadaan sosial dan lingkungan yang berbasis teknologi, selanjutnya dengan keberlangsungan program apakah kemudian dapat membawa pemerintahan yang cerdas, terbuka, dan partisipatif berdasarkan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur serta mengelola program yang berbasis teknologi dan bagaimana kecakapan masyarakat dalam artian dapat berkontribusi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa setelah diterapkannya program *smart village* pada tatanan pembangunan untuk suatu pengembangan desa. Beberapa

pernyataan diatas yang kemudian akan menjadi pegangan bagi peneliti untuk suatu pengamatan. Hal tersebut tidak terlepas dalam cakupan *Smart Environment, Smart Government dan Smart Community* yang kemudian tentunya ini menjadi fokus dalam keberlangsungan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dengan melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang secara langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang tidak. Sesuai dengan fokus penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah pemerintah desa, masyarakat dan *stakeholder*. Dari aktor-aktor ini, peneliti akan menggali informasi seintensif mungkin untuk memperoleh informasi yang utuh tentang permasalahan penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai Governansi program *smart village* di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, D. I. Y. Adapun hal yang akan diwawancarai mencakup *Smart environment, Smart government dan Smart community*.

Wawancara dilakukan peneliti terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa untuk meminta izin untuk melakukan penelitian tentang program *smart village*. Karenanya Pemerintah Desa kemudian menunjukan pihak mana saja yang mengetahui dan terlibat dalam menempatkan Srimulyo sebagai desa yang merancang atau menerapkan program *smart village*. Wawancara dilakukan selama berkali-kali pertemuan dengan narasumber yang

telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai, dan juga peneliti melakukan *live in* bersama warga masyarakat dan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Namun, penentuan narasumber untuk masyarakat peneliti akan mengambil dari masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kalurahan untuk memastikan kesamaan informasi yang diterima oleh warga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain record yang telah dipersiapkan karena adanya permintaan dari penyidik. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data-data yang pasti tentang penelitian. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, dokumen-dokumen dan catatan lain yang relevan dengan penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, peneliti juga akan mengambil data dari dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo.

Menurut Suharsini Arikanto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

Berdasarkan hal tersebut dokumen yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profil Kalurahan Srimulyo
2. Dokumen Peresmian Penerapan Program *Smart Village* di Srimulyo
3. Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Srimulyo
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

5. Dokumen Penetapan Arah Kebijakan Pengembangan Desa
6. Dokumen Sistem Informasi Administrasi Kelurahan Srimulyo

d. Metode Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dalam pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan perbandingan dengan berbagai cara dan waktu. Menurut Sugiyono (2016:373) terdapat tiga macam triangulasi yaitu:

- 1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasi sumber masih belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik atau metode yang lebih tertarik untuk melakukan suatu pemahaman secara mendasar terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi. Teknik menganalisis data yang harus dilakukan oleh peneliti ialah model analisis jalinan atau mengalir yang dalam pelaksanaan penelitian ada 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu:

a. *Data Reduktion* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat disederhanakan tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya, agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

c. *Concluding Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. Teknik Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan setelah dilakukannya reduksi data. Metode penyajian data yang disajikan oleh peneliti secara tekstual terutama bersifat naratif. (Miles dan Hiberman dalam Sugiyono, 2011:341). Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahapan ini data-data yang telah diperoleh kemudian disusun lalu

disajikan agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN SRIMULYO

Pada bab ini peneliti akan memaparkan terkait deskripsi ataupun profil lokasi penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan pada suatu Pemerintahan Kalurahan yang terletak pada Kapanewon Piyungan, Bantul, Kota Yogyakarta, dimana peneliti akan menguraikan satu-persatu sebagai berikut.

a. Profil Kalurahan Srimulyo

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua desa lain di Kecamatan Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di cakupan Provinsi D. I. Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Sebelum terbentuk seperti sekarang, Kalurahan Srimulyo awalnya merupakan wilayah hasil penggabungan dari 4 (empat) Kalurahan yakni Kalurahan Bintaran, Kalurahan Payak, Kalurahan Sandeyan dan Kalurahan Jolosutro. Keempat Kalurahan tersebut dan dusun-dusun (padukuhan-padukuhan) di dalamnya kemudian digabung menjadi Kalurahan Srimulyo pada tahun 1946. Selanjutnya, setelah lebur menjadi

Kalurahan Srimulyo, keempat kalurahan tersebut menjadi “Kring” yang terdiri dari Kring Bintaran, Kring Payak, Kring Sandeyan, dan Kring Jolosutro. Meskipun pembagian tersebut tidak dibakukan secara administratif pemerintahan tetapi sangat bermanfaat dalam menunjang kegiatan operasional pemerintahan Kalurahan Srimulyo karena ikatan emosional yang cukup erat dari warga masyarakat serta dukungan oleh letak geografis yang berdampingan, adanya kesamaan potensi wilayah dan eratnya kegiatan sosial budaya masyarakat dalam lingkup satu kring.

Wilayah Kalurahan Srimulyo terbagi menjadi 4 kring terdiri dari 22 dusun yang mencakup 119 RT (rukun tetangga), yakni; Kring Bintaran terdiri dari 4 dusun Kranden, Cikal, Bintaran Kulon, dan Bintaran Wetan. Kring Payak terdiri dari 6 dusun klenggotan, Bangkel, Payak Cilik, Payak Tengah, Payak Wetan dan Onggopatran. Kring Sandeyan terdiri dari 6 dusun kabregan, Sandeyan, Ngijo, Duwetgentong, Jombor, dan Pleseden. Dan kemudian Kring Jolosutro terdiri dari 6 dusun jasem, Prayan, Jolosutro, Ngelosari, Kaligatuk, Pandeyan.

Data Lurah/Kepala Kalurahan Srimulyo sejak berdiri sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. lurah Kalurahan Srimulyo

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Cokro Subroto	1946-1950	Payak Tengah
2.	Amat Sahid	1950-1965	Bintaran Kulon
3.	Prapto Rahardjo	1965-1993	Jolosutro
4.	H. Tupardiyono	1994-2013	Bintaran Kulon
5.	Drs. Wajiran	2013-2019 (sekarang)	Jolosutro

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

b. Pemerintahan Kalurahan

Visi dan Misi Kalurahan

Agar pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kalurahan Srimulyo dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Kalurahan, yaitu dengan menyusun RPJM Desa Tahun 2020/2026 yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan.

Visi dan Misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Kalurahan terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif. Adapun **Visi Kalurahan “Terwujudnya Masyarakat Desa Srimulyo yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Nusantara”**

Berkaitan dengan visi lurah Srymulio tersebut, maka benar tekad dari masyarakat Kalurahan Srymulio untuk senantiasa ingin mewujudkan Kalurahan Srymulio menjadi Desa yang mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut terlihat dari tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa untuk mengembangkan potensi desa melalui konsep menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata, untuk mendapatkan profit dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara rasional, efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan yang berkolaborasi dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan desa. Sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan, perekonomian masyarakat Srimulyo.

Untuk mencapai Visi Kalurahan Srimulyo, ditetapkan misi sebagai berikut:

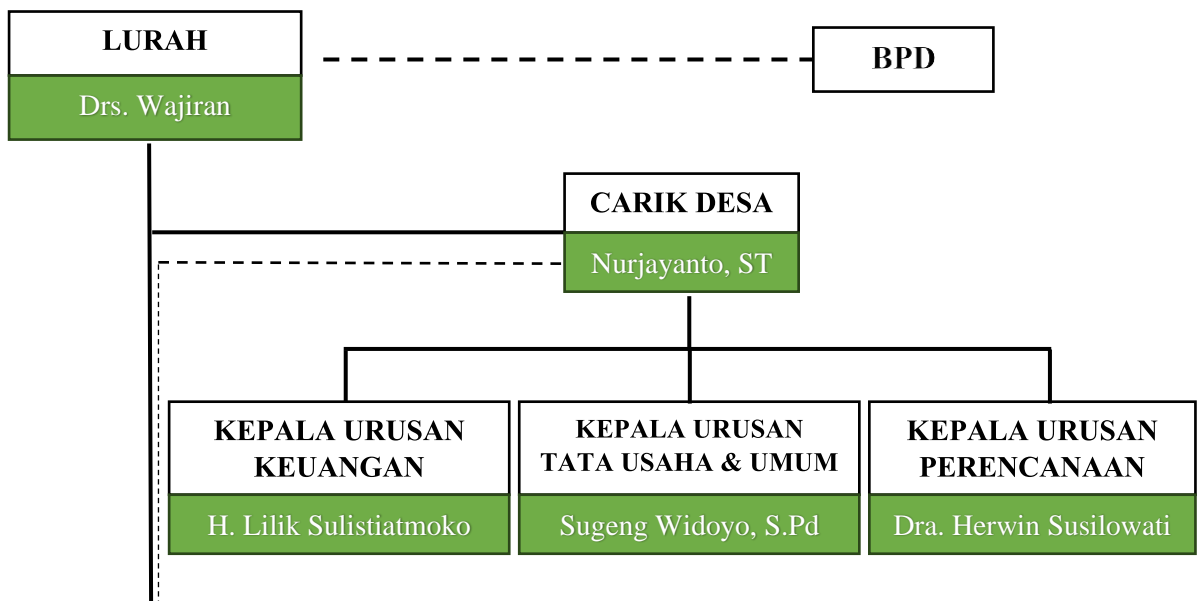
1. Menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwasatakan dalam wadah desa wisata

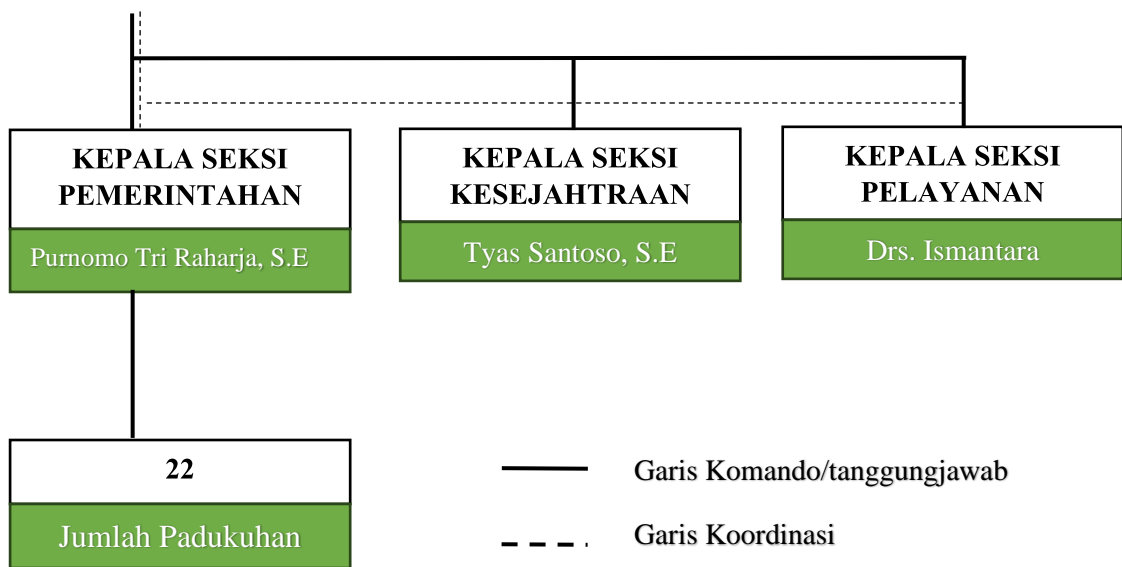
2. Menjadikan Desa Srymulio sebagai kawasan terpadu pengembangan industri dan pariwisata
3. Membangun kemitraan global dengan stakeholder terkait demi kemajuan pembangunan Desa Srymulio
4. Memberdayakan potensi dan sumber daya Desa Srymulio secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan hidup beragama serta menumbuhkan budi pekerti yang berkepribadian indonesia.
6. Memantapkan sumber pendapatan, kekayaan, dan keuangan Desa Srimulyo
7. Terwujudnya demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
8. Terwujudnya kemitraan yang harmonis dan kondusif antar lembaga-lembaga di Desa Srimulyo
9. Terwujudnya kemandirian Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan masyarakat Desa Srimulyo.

Misi tersebut adalah upaya Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan baik melalui sinergitas antara stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pemerataan pembangunan desa. Membangun SDA dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang sebagai pilar pokok pembangunan desa. Membangun kolektifitas antar wilayah melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi disegala lini. Sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif.

Berdasarkan kondisi lapangan implementasi dari visi dan misi diatas belum sepenuhnya terwujud. Dalam Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srymulio Tahun Anggaran 2022. Ada yang sudah terealisasi seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana/darurat bencana. Ada pula yang sedang dalam proses implementasi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dari sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan daya ungkit. Penerapan pemerintahan atas asas *good government* mampu dilakukan meski belum sepenuhnya.

Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Srymulio Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Srymulio yang berpedoman pada Peraturan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Srymulio secara lengkap beserta data personil dan perangkat desa pada tabel di bawah ini:





Sumber: Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Kalurahan Srimulyo 2023

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Kampung di atas merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di kalurahan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Terlihat dari tabel diatas, bahwa struktur pemerintah desa, dimana ada seorang kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan dibantu perangkat desa. Struktur perangkat menjadi 3 kaur, 3 kasi yang sekarang berganti nama dengan sebutan menjadi Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa serta diikuti 22 ketua padukuhan, yang juga mempunyai peran penting dalam proses berjalannya pemerintahan efektif dan efisien mengatur dan mengurus masyarakat dalam ranah yang lebih sempit dalam struktur organisasi desa.

Berdasarkan perannya masing-masing tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah

kalurahan yang berkaitan dengan pemerintahan kalurahan yang mengatur pemerintahan kalurahan, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Dengan adanya perangkat desa atau biasa disebut pamong desa ini dapat membantu tugas-tugas pemerintahan desa berdasarkan tupoksinya masing-masing, perangkat desa juga mesti mampu memahami setiap mekanisme yang berjalan dalam roda pemerintahan desa untuk kemudian dapat menopang segala bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang harus diakomodir oleh Pemerintah Kalurahan demi terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera dalam pembangunan yang lebih masif dan berkelanjutan.

Oleh karenanya, berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pengadvokasian terhadap perkembangan masyarakat juga harus diutamakan oleh Pemerintah Kalurahan tersebut, karena wujud dari program desa cerdas atau dikenal dengan sebutan *smart village* adalah untuk bagaimana kemudian kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya juga, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan di Kalurahan Srimulyo yang digital. Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat.

Sehingga demikian dengan adanya program desa cerdas yang menjadikan Kalurahan Srimulyo sebagai desa yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan roda pemerintahan desa secara digitalisasi, melalui pemanfaatan teknologi Pemerintah Desa Srimulyo tentunya sigap dalam situasi apapun yang itu berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan sistem online. Hal diketahui bahwa penggunaan sistem pelayanan yang berbasis online tidak membatasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan pemerintah desa, karena pelayanan online ini selain mempermudah masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebutuhan masyarakat, juga mempermudah akses bagi masyarakat yang mengalami kendala waktu terhadap kebutuhan mereka. Dengan adanya pelayanan online ini kendala mengenai waktu bagi masyarakat desa untuk bertemu dengan Pemerintah Desa dapat diakses melalui media online yang sudah disiapkan oleh perangkat atau pamong desa.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan melalui tabel berikut terkait data personil perangkat desa (Pamong Desa) berdasarkan tugas atau jabatan masing-masing pamong desa yang sampai pada saat ini tengah berdinamika dalam menjalankan tugas dari Pemerintah Kalurahan Srimulyo dalam menciptakan keberedaan pemerintahan yang demokratis serta dalam hal ini sebagai aktor yang berkontribusi penuh dalam setiap agenda pemerintahan desa.

DATA PERSONIL PERANGKAT DESA

Tabel 3. Data Personil Perangkat Desa

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Drs. Wajiran	Lurah	Laki-laki
2.	Nurjayanto, S.T	Carik	Laki-laki
3.	Purnomo Tri Raharja, S.E	Jagabaya	Laki-laki
4.	Tyas Santoso	Kasie Kesejahtraan	Laki-laki
5.	Reza Fajar Pratama, S.T	Ulu-ulu	Laki-laki
6.	H. Lilik Sulistiatmoko	Kaur Danarta	Laki-laki
7.	Dra. Herwin Susilowati	Kaur Pangripa	Laki-laki
8.	Sugeng Widoyo, S.Pd. I	Kaur Tata Laksana	Laki-laki
9.	Sutardi	Dukuh Kradenan	Laki-laki
10.	Setyo Handoko	Dukuh Cikal	Laki-Laki
11.	Khalida Tyas Wara, S.S	Dukuh Bintara Kulon	Perempuan
12.	Ediana	Dukuh Bintara Wetan	Laki-laki
13.	Sadali	Dukuh Klenggotan	Laki-laki
14.	Giyanta	Dukuh Bangkel	Laki-laki
15.	Wawan Rahayu	Dukuh Payak Cilik	Laki-laki
16.	Joni Endro Kuncoro	Dukuh Payak Tengah	Laki-laki
17.	Lulut Tryono, S.E, M.AP.	Dukuh Payak Wetan	Laki-laki
18.	Heni Nur Widiastuti	Dukuh Onggopatran	Perempuan
19.	Kusuma Aji Dwi Pamungkas	Dukuh Kabregan	Laki-laki
20.	Aris Noor Hidayat	Dukuh Sandayen	Laki-laki
21.	Sutrisna	Dukuh Duwet Gentong	Laki-Laki
22.	Nanang Nurdian	Dukuh Pleseden	Laki-laki
23.	Rohmadiyahanto	Dukuh Ngijo	Laki-laki
24.	Nurfembryanto S.P.,S. Kom	Dukuh Jombor	Laki-laki
25.	Nanang Nugroho	Dukuh Jolosutro	Laki-laki
26.	Margiyanta	Dukuh Prayan	Laki-laki
27.	Pardiyono	Dukuh Ngelosari	Laki-laki
28.	Supriyanto	Dukuh Kaligatuk	Laki-laki
29.	Drs. Suprpta	Dukuh Jasem	Laki-laki
30.	Sogiran, S.E	Dukuh Jasem	Laki-laki

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Pada data di atas terlihat bahwasanya dari seluruh perangkat desa terdapat dua keterwakilan perempuan di dalamnya, artinya keterlibatan perempuan masih minim di dalam tatanan pemerintah desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya minat perempuan

untuk menjadi perangkat desa, selain itu ada sebagian dari mereka yang memilih Bertani dan berkebun, selebihnya bekerja di luar desa.

Dari segi jabatan dan jenis kelamin yang berbeda menjadikan seluruh perangkat desa saling berbagi dan betukar pikiran serta pengalaman dari masing-masing background yang dimiliki dalam membangun desa.

Dalam sebuah organisasi tentu menjadi hal yang wajar terjadi suatu perbedaan pandangan dalam menjalankan roda organisasi. Demikian yang terjadi di Kalurahan Srymulio, perbedaan prespektif dalam membangun desa ini kemudian menjadi sebuah ruler bagi desa dalam membangun desa yang lebih serius.

- **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. BPD mempunyai kewenangan dalam membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut. Adapun daftar anggota BPD Kalurahan Srimulyo seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Daftar Anggota BPD

No.	Nama	Jabatan	L/P
1.	Suyanto	Ketua	L
2.	Subaryanto	Wakil Ketua	L
3.	Rahmaji	Sekretaris	L
4.	Bistamik Wulandari	Anggota	P
5.	Nuri Hanafi Arif	Anggota	L
6.	Sutiman	Anggota	L
7.	Dewi Arum Fatmawati	Anggota	P
8.	Muhammad Bardi	Anggota	L
9.	Wajiran	Anggota	L

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan tabel di atas terlihat adanya keterwakilan wilayah. Dimana keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Srimulyo terdiri dari sembilan orang. Pemilihan dilakukan dengan perwakilan dari jumlah padukuhan yang ada (22 Pedukuhan), pemilihan BPKal dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kalurahan. BPD merupakan penyelenggara musyawarah kalurahan dalam melakukan revisi pada isi peraturan kalurahan tentang RPJM Desa, berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak lain.

c. Aspek geografis

a. Letak Wilayah

Letak wilayah Desa Srimulyo sangat strategis, secara geografis Kalurahan Srimulyo berada pada ketinggian 110 meter diatas permukaan laut yang diapit dan dilewati 2 sungai besar yakni sungai opak dan sungai Gawe, memiliki permukaan tanah yang beragam baik tanah datar maupun tanah pegunungan. Kalurahan Srimulyo juga di lalui oleh pegunungan.. Dan juga di lalui oleh jalan raya yogya – wonosari yang dengan demikian lalu lintas dan transportasi sedemikian padat yang pada akhirnya Kalurahan Srimulyo menjadi jalur alternatif dengan 3 jalur tujuan utama yakni jalur ke barat menuju kota yogyakarta, jalur ke utara menuju kota klaten, dan jalur timur menuju kota wonosari.

Kalurahan Srimulyo termasuk salah satu Desa yang berada di paling timur Kabupaten Bantul yang kemudian berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Adapun, secara administrasi Kalurahan Srimulyo memiliki batas-batas sebagai berikut:

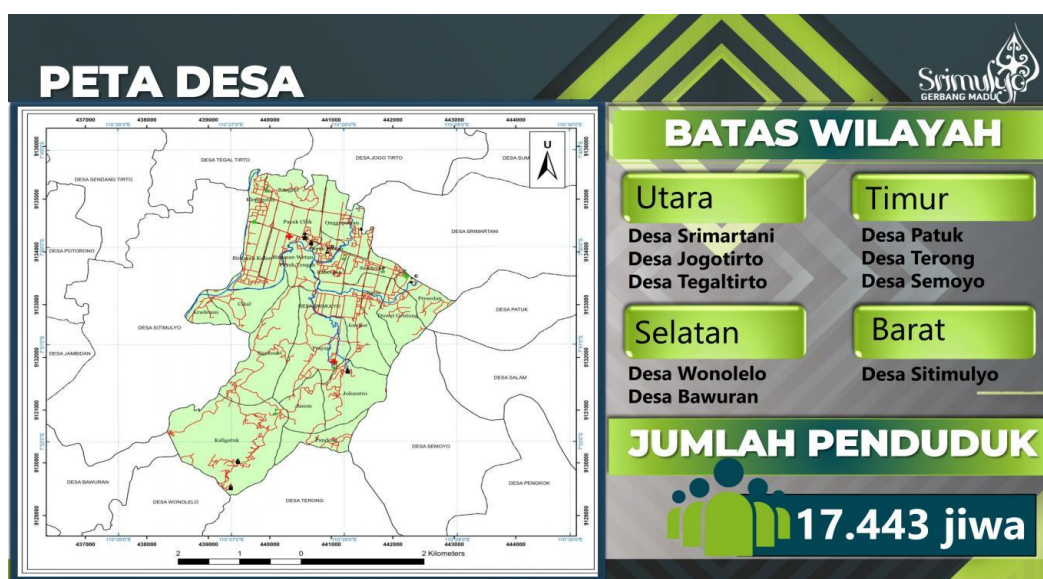
Tabel 5. Batas-batas Wilayah

1.	Batas Utara	Desa Tegal Tirto, Kabupaten Sleman dan Desa Jogo Tirto Kabupaten Sleman
2.	Batas Selatan	Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul; Desa Terong, Kabupaten Bantul; dan Desa Semoyo, Kabupaten Gunungkidul
3.	Batas Barat	Desa Sitimulyo, Kabupaten Bantul dan Desa Bawuran, Kabupaten Bantul;
4.	Batas Timur	Desa Srimartani, Kabupaten Bantul; Desa Patuk, Kabupaten Gunungkidul; Desa Salam, Kabupaten Gunungkidul; dan Desa Semoyo, Kabupaten Gunungkidul;

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Batas wilayah tersebut merupakan informasi geospasial dasar yang penting dan berguna dalam pembangunan di Kalurahan Srimulyo. Batas-batas desa tersebut dimiliki masing-masing desa agar tidak menyebabkan kesalahpahaman diantara desa-desa/kalurahan lain sehingga menyebabkan konflik. Batas desa juga sebagai yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kalurahan Srimulyo yang menjadi kewenangannya dengan kalurahan lainnya.

Gambar 1. Peta Wilayah Kalurahan Srimulyo



Sumber : Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

b. Luas Wilayah

Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta, memiliki luas wilayah \pm 1.456,7585 Ha yang terbagi dengan penggunaan lahan beragam, berikut pada tabel dibawah ini penggunaan lahan Kalurahan Srimulyo.

Tabel 6. Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Jumlah
1.	Fasilitas Jalan	5,4640
2.	Sawah dan Ladang	573,1885
3.	Pemukaman	3,6065
4.	Pemukiman dan Hutan	866,267
5.	Industri	2,5250
6.	Pertokoan/perdagangan	5,0000
7.	Perkantoran	0,2950
8.	Pasar desa	0,4125

Sumber : Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Bentuk penggunaan lahan sawah, ladang, pemukiman, pemakaman dan fasilitas jalan maupun pasar desa tersebut benar digunakan sebagaimana mestinya. penggunaan lahan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kalurahan Srimulyo untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib tata ruang. Topografi dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 23-24 °C dengan curah hujan 2370 mm/tahun.

Kondisi Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta, merupakan sebuah kalurahan yang terletak diantara perbatasan, adapun disebelah utara kalurahan Tegal Tirto dan Kalurahan Jogo Tirto, sebelah selatan kalurahan Wonolelo kalurahan Terong dan Kalurahan Semoyo, sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan

Bawuran. Sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Srimartani, Kalurahan Patuk, Kalurahan Salam, dan Kalurahan Semoyo. Gambar 1 Peta Wilayah Kalurahan Srimulyo. Dalam hal ini lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Kondisi Kalurahan Srimulyo terbilang sangat baik. Kalurahan Srimulyo terdiri atas 22 Dusun, dan 119 RT selama penelitian di lapangan terlihat hampir dari masing-masing wilayah memiliki potensi yang baik.

Adapun potensi yang dimiliki Kalurahan Srimulyo diantaranya dalam bidang pertanian, perkebunan, kerajinan dan lokasi atau wisata dan sangat berkompeten serta beragam yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan Srimulyo.

c. Orbitrasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan

Secara geografis letak Kalurahan Srimulyo terhadap pusat-pusat kota dan pemerintah terbilang tidak cukup jauh dan sangat mudah dijangkau, selengkapnya sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Kapanewon : 2 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 21 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 12 Km

Keterangan jarak diatas merupakan gambaran terkait geografis Kalurahan Srimulyo. Akses sangat penting dalam menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah, jika melihat akses dari Kalurahan Srimulyo menuju pusat kota, aksesnya sangatlah mudah, dengan didukung kondisi jalan yang bagus dan memadai, jika dilihat dari jarak tempuh dari Kalurahan menuju ke ibukota kecamatan, jaraknya 2 Km. dan juga jarak dari Kalurahan ke ibukota kabupaten, jaraknya terbilang

lumayan dengan jarak tempuh yaitu 21 Km. Jarak-jarak tersebut terbilang cukup dekat dan lumayan jauh untuk ditempuh.

Secara umum kondisi tanah di Kalurahan Srimulyo ialah tanah yang beragam baik tanah datar maupun tanah pegunungan. Wilayah Kalurahan Srimulyo diapit dan dilewati oleh 2 sungai besar yakni sungai Opak dan sungai Gawe. persawahan masih cukup banyak, hingga hampir sebagian besar wilayahnya terhampar sawah milik perorangan atau kelompok. dengan wilayah yang cukup luas Kalurahan Srimulyo memiliki luas tanah kas desa 379.867 meter persegi.

Kalurahan Srimulyo memiliki daerah dataran rendah. Kalurahan Srimulyo merupakan daerah bagian timur Kabupaten Bantul, sehingga tidak memiliki daerah pantai karena letaknya terbilang dekat perkotaan. Tanah yang luas tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian, bangunan sekolah, balai desa, balai padukuhan, kuburan, perkantoran pemerintahan, pertokoan dan lapangan serta fasilitas jalan dan pasar desa. Ada pula tanah hutan yakni hutan adat dan hutan rakyat.

Jika dilihat dari posisi Kalurahan Srimulyo merupakan desa yang berada di dataran rendah dan ada sedikit pegunungan artinya Kalurahan Srimulyo memiliki tanah yang rata dan perbukitan dengan karakter wilayah desa seperti ini, maka Kalurahan Srimulyo mempunyai potensi yang sangat baik terlepas dari potensi wisata yang memadai, seperti potensi dalam bidang pertanian, dan/atau perkebunan. Segala jenis pertanian dilakukan pada lahan-lahan yang ada, mulai dari sawah, kopi-kopian, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Kalurahan Srimulyo juga mempunyai dua iklim sama halnya desa-desa yang ada di Indonesia yaitu

iklim kemarau dan hujan. Iklim yang ada di Kalurahan Srimulyo juga menjadi peran pendukung bagi berlangsungnya pertanian yang ada di Kalurahan Srimulyo, dengan ini Kalurahan Srimulyo secara geografis dapat dikatakan sebagai desa yang pertaniannya subur.

d. Aspek Demografis

Masyarakat Kalurahan Srimulyo merupakan masyarakat *socio-cultural* yang terdiri dari berbagai agama, ras dan suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas pendidikan di Kalurahan Srimulyo cukup memadai, terdapat sekolah TK, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kependudukan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, sebab penduduk memberikan peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Dimana sumber daya dari penduduk apabila kualitasnya tinggi, maka untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa sudah tidak diragukan lagi. Adapun jumlah penduduk Kalurahan Srimulyo sebesar 17.612 Jiwa.

Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, tingkatan usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Data ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi kependudukan yang ada di Kalurahan Srimulyo, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

a. Data Pendudukan

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Kalurahan Srimulyo merupakan salah satu kalurahan yang memiliki jumlah warga yang penyebarannya terbilang cukup merata dan memiliki jumlah yang banyak, selengkapnya akan uraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8651	49,18
2.	Perempuan	8961	50,82
Jumlah Penduduk		17.612	100

sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Dengan jumlah padukuhan yang terdiri dari 22 padukuhan yang ada di Kalurahan Srimulyo. Jenis kelamin merupakan salah satu kategori yang diperoleh manusia sejak lahir. Jenis kelamin juga merupakan salah satu unsur pembeda dalam diferensiasi sosial. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat horizontal atau tidak menunjukkan perbedaan derajat yang tinggi atau rendah sebab perbedaan tersebut hanya menyangkut bentuk dan sifat dasar.

Di berbagai bidang kehidupan, perbedaan jenis kelamin bukanlah halangan untuk melakukan suatu pekerjaan. Saat ini di Kalurahan Srimulyo data yang saya dapatkan banyak wanita yang menggeluti bidang pekerjaan yang dahulu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, meskipun ada beberapa pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh wanita. Contohnya, seperti bekerja menjadi tukang becak atau bekerja sebagai tukang bangunan yang handal digeluti oleh kaum laki-laki.

2) Jumlah Pendudukan Menurut Usia

Data ini bermanfaat untuk mengetahui lajunya pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk berdasarkan usia yang ada di Kalurahan Srimulyo, pertumbuhan penduduk merupakan sesuatu persoalan yang harus terus diakomodir oleh Pemerintah Desa guna mengetahui bagaimana perkembangan penduduk masyarakat yang kemudian Pemerintah Desa melakukan rekapitulasi dalam data demografis desa/Kalurahan Srimulyo. Laju Pertumbuhan penduduk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	2 s/d 4 Tahun	464	2,64
2.	5 s/d 9 Tahun	1203	6,84
3.	10 s/d 14 Tahun	1394	7,92
4.	15 s/d 19 Tahun	1258	7,15
5.	20 s/d 24 Tahun	1300	7,39
6.	25 s/d 29 Tahun	1199	6,82
7.	30 s/d 34 Tahun	1088	6,18
8.	35 s/d 39 Tahun	1256	7,14
9.	40 s/d 44 Tahun	1440	8,19
10.	45 s/d 49 Tahun	1302	7,40
11.	50 s/d 54 Tahun	1329	7,55
12.	55 s/d 59 Tahun	1196	6,80
13.	60 s/d 64 Tahun	996	5,66
14.	65 s/d 69 Tahun	787	4,47
15.	70 s/d 74 Tahun	501	2,85
16.	Diatas 75 Tahun	879	5,00
Jumlah Penduduk		17612	100,00

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, Kalurahan Srimulyo mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang produktif di Kalurahan Srimulyo dengan jumlah 54% sedangkan penduduk yang bisa

dikatakan belum atau sudah tidak produktif mempunyai persentase 46%. Dengan demikian usia yang belum dan sudah tidak produktif lebih sedikit jumlahnya.

3) Jumlah Penduduk menurut jenis pekerjaan

Kalurahan Srimulyo jika dilihat mempunyai lahan pertanian yang sangat luas dan juga dikatakan subur, hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat Kalurahan Srimulyo bermata pencaharian sebagian besar disektor pertanian dan beberapa jenis pekerjaan lain yang ditekuni oleh masyarakat yang ada di Kalurahan Srimulyo. Sektor pertanian juga mempunyai peran sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, berikut dapat dilihat data menurut jenis pekerjaan yang ada di Kalurahan Srimulyo:

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Keterangan Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Belum/tidak bekerja	3244	18,44
2.	Mengurus Rumah Tangga	1489	8,46
3.	Pelajar/mahasiswa	3092	17,58
4.	Pensiunan	236	1,34
5.	PNS	323	1,84
6.	TNI	80	0,45
7.	POLISI	56	0,32
8.	Perdagangan	99	0,56
9.	Petani/pekebun	452	2,57
10.	Peternak	4	0,02
11.	Konstruksi	2	0,01
12.	Transportasi	6	0,03
13.	Karyawan Swasta	1874	10,65
14.	Karyawan BUMN	32	0,18
15.	Karyawan BUMD	9	0,05
16.	Karyawan Honorer	46	0,26
17.	Buruh Harian Lepas	2352	13,37
18.	Buruh tani/pekebun	1779	10,11
19.	Buruh Nelayan/perikanan	2	0,01
20.	Buruh Peternakan	5	0,03
21.	Pembantu Rumah Tangga	5	0,03

22.	Tukang Cukur	4	0,02
23.	Tukang Listrik	3	0,02
24.	Tukang Kayu	19	0,11
25.	Tukang las	1	0,01
26.	Tukang Jahit	19	0,11
27.	Penata Rias	4	0,02
28.	Penata Busana	2	0,01
29.	Mekanik	13	0,07
30.	Seniman	6	0,03
31.	Imam Masjid	1	0,01
32.	Wartawan	4	0,02
33.	Juru masak	3	0,02
34.	Anggota DPRD	1	0,01
35.	Dosen	7	0,04
36.	Guru	112	0,64
37.	Pengacara	1	0,01
38.	Arsitek	1	0,01
39.	Konsultan	2	0,01
40.	Dokter	10	0,06
41.	Bidan	8	0,05
42.	Pedagang	116	0,66
43.	Perangkat Desa	32	0,18
44.	Wiraswasta	1965	11,17
Jumlah Penduduk		17612	100,00

sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan berjumlah 14.348, dengan yang belum bekerja adalah sekitar 3.244 orang jika dihitung dari jumlah keseluruhan penduduk Kalurahan Srimulyo. Terlihat mata pencaharian penduduk begitu beragam dan sebagian besar berada di sektor pertanian, meski dengan jumlah yang terbilang minim dari jumlah penduduk yang tidak bekerja. Akan tetapi hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah desa untuk kemudian menstabilkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih membutuhkan atau yang sedang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Disisi lain dari sektor pertanian dengan jumlah penduduk 452 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor

pertanian kurang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan kurangnya peranan masyarakat dalam menstabilkan perekonomian. Kemudian sebagai pemuda-pemudi sebagai pelajar/mahasiswa, lalu sebagai pekerja swasta dan buruh harian lepas ini merupakan masalah yang muncul dari Kalurahan Srimulyo adalah banyaknya pemuda yang keluar dari Kalurahan Srimulyo untuk bekerja sebagai buruh harian lepas dan merantau diluar.

Adapula yang berprofesi sebagai polisi dan tni berjumlah 136 orang, dan masih banyak ragam profesi lainnya yang digeluti oleh masyarakat Kalurahan Srimulyo. Kehidupan masyarakat Kalurahan Srimulyo, terutama yang telah memiliki pekerjaan dan menjalankan tugasnya sehari -hari, tidak lepas dari profesi atau kedudukan. Walau demikian perbedaan profesi akan berhubungan dengan perbedaan sumber dan besarnya pendapatan, sebagai hak yang harus diterima.

4) Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Berikut data tingkat pendidikan yang ada di Kalurahan Srimulyo pada tabel di bawah ini:

a. Lulusan Pendidikan Umum

Tabel 10. Lulusan Pendidikan Umum

No.	Keterangan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	3446	19,59
2.	Belum Tamat SD	1529	8,69
3.	Tamat SD	2972	16,89
4.	SLTP	2469	14,03
5.	SLTA	5779	32,85
6.	Diploma I/II	135	0,77
7.	Akademi/D III/S.Muda	317	1,80
8.	Diploma IV/Strata I	893	5,08
9.	Strata II	50	0,28
10.	Strata III	2	0,01

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Pendidikan merupakan salah satu pilar paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal kesempatan untuk menyenjam pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun. Pemerataan tersebut harus juga diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik, sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efesiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Berdasarkan tabel yang tertera diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ada di Kalurahan Srimulyo yakni SLTA/Sederajat yakni sebesar 32,85%. Namun dapat dilihat bahwa memang penduduk Kalurahan Srimulyo banyak yang tidak atau belum sekolah dengan persentase 3,446%. Jika dibandingkan dengan penduduk berpendidikan atau yang sekolah baik tingkat SD/SLTP/SLTA/sederajat maupun Pendidikan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan memang memiliki peran penting dalam meningkatkan olmu dan pengetahuan masyarakat di Kalurahan Srimulyo. Kalurahan Srimulyo kini dengan

lokasi sekolah yang cukup terjangkau, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas Pendidikan/sekolah.

Menurut pengamatan lapangan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena kesulitan ekonomi, kurangnya niat seseorang/individu untuk mengenyam pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau daerah tertinggal dan selain itu karena adanya faktor lingkungan (pergaulan).

e. Sarana dan Prasarana Umum

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalurahan menjadi lebih baik. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional global dapat ditingkatkan. Sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan masyarakat, berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Kalurahan Srimulyo.

Tabel 11. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Sarana Pendidikan	17
2.	Sarana Ibadah	79
3.	Sarana Olahraga	43
4.	Sarana Budaya	17
5.	Balai Pertemuan	1

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kebutuhan. Pada daerah peneltian ini yang terdiri atas 22 padukuhan tentunya kebutuhan setiap padukuhan akan berbeda dan didasarkan pada tingakt kebutuhan.

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan yang mulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu Kalurahan Srimulyo juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya baik tradisional maupun modern, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Seni dan Budaya

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1	Kenduri	Aktif	Semua Dusun
2	Nyadran	Aktif	Semua Dusun
3	Mauladan	Aktif	Semua Dusun
4	Gumbrekan	Aktif	Semua Dusun
5	Sepasaran	Aktif	Semua Dusun
6	Tingkeban	Aktif	Semua Dusun
7	Dekahan	Aktif	Semua Dusun
8	Selapanan	Aktif	Semua Dusun
9	Bersih Dusun	Aktif	Semua Dusun
10	Labuhan	Aktif	Semua Dusun
11	Ruwatan	Aktif	Semua Dusun
12	Rondo thek-thek	Aktif	Semua Dusun
13	Jatilan	Aktif	Semua Dusun
14	Sholawatan	Aktif	Semua Dusun
15	Campursari	Aktif	Semua Dusun
16	Ketoprak	Aktif	Semua Dusun

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Seni dan budaya merupakan modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalurahan Srimulyo memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut kedepan Kalurahan Srimulyo diharapkan lebih maju, dan mampu menjalankan roda pembangunan. Dinamisasi budaya juga harus diimbangi dengan mental yang sehat serta fisik yang kuat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut. Setidaknya terdapat keanekaragaman seni dan budaya baik modern maupun tradisional di Kalurahan Srimulyo yang perkembangannya tergambarkan, namun semenjak Covid-19 melanda kegiatan masyarakat Srimulyo terhentikan sementara termasuk kegiatan seni dan budaya, dan kini kegiatan-kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan kembali.

Selain itu, terdapat beberapa potensi wisata hasil pemetaan yang dilakukan Pemerintah Desa Srimulyo. Berikut ini akan dicamtumkan potensi-potensi yang ada di Kalurahan Srimulyo yang menjadi bagian dari pendapat asli desa, adapun potensinya akan di uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Potensi Wisata

No.	Potensi Wisata	Keterangan
1.	Taman Tempuran Cikal	Ada
2.	Bukit Tompak	Ada
3.	Kampung Sunset Watu Ambel	Ada
4.	Bukit Tinatar	Ada
5.	Gerbang Banyu Langit	Ada
6.	Goa Song Kamal	Ada
7.	Batu Kapal	Ada
8.	Gunung wangi Bangkel	Ada
9.	Bukit Bintang Hargodumilah	Ada
10.	Makam Sunan Geseng	Ada
11.	Watu Wayang	Ada
12.	Pasar Kebon Empring	Ada

13.	Mata Air Hargolawu	Ada
14.	Teratai Biru Kali Opak	Ada
15.	Puncak Bucu	Ada
17.	Taman Nggirli	Ada

Sumber: Dok. Profil Kalurahan Srimulyo 2023

Potensi Wisata di desa tersebut di atas merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Potensi tersebut digali di beberapa wilayah padukuhan yang ada di Kalurahan Srimulyo. Potensi yang ada dipetakan berdasarkan potensi alam, potensi buatan, potensi kebudayaan dan seni. Dimana potensi yang ada masuk pada kategori potensi pariwisata, ketahanan pangan dan UMKM. Maka dari itu, potensi tersebut dapat mendukung Pemerintahan Kalurahan Srimulyo untuk memperoleh sumber dana. Berdasarkan prioritas pemulihan ekonomi saat ini adalah pariwisata, ketahanan pangan dan UMKM.

f. Kondisi Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Srimulyo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian dan potensi wisata. Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibubukan dalam APMDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pungutab Desa bahwa sumber Pendapatan Kalurahan meliputi:

1. Sumber Pendapatan Kalurahan
 - a. Dana Desa
 - b. Alokasi Dana Desa
 - c. Pendapatan asli Kalurahan terdiri atas dari hasil kekayaan Kalurahan, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan yang sah;

- d. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional
 - e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menerima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disalurkan melalui kas Kalurahan;
 3. Sumber pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun kekayaan Kalurahan yang dikelola terdiri dari; tanah kas kalurahan, bangunan kalurahan yang dikelola oleh kalurahan, serta lain-lain kekayaan milik kalurahan.

Pendapatan desa atau dalam hal ini pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan yang berupa uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya.

Perkiraan pendapatan Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.655.323.939,00 (dua belas milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga

ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagaimana akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Perkiraan pendapatan tahun 2023

URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Kalurahan	3.766.690.385,00
Hasil Usaha Kalurahan	
Hasil Aset Kalurahan	
Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	60.525.000,00
Pendapatan Transfer	
Dana Desa/Kalurahan	1.615.798.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	387.910.054,00
Alokasi Dana Desa/Kalurahan	1.730.419.500,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.083.981,000
Pendapatan Lain-lain	
Bunga Bank	
JUMLAH PENDAPATAN	12.655.323.939,00

Sumber: Dok. RKPKal 2023

Pendapatan Kalurahan diatas adalah didasarkan pada hasil evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun 2022 serta mengacu pada pagu indikatif Dana Desa/Kalurahan dari APBN, Dana ADD dari pemerintah daerah, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan khusus yang telah diatur oleh peraturan Bupati yang terkait.

Terlihat dari tabel diatas bahwasannya perkiraan pendapatan Desa Srimulyo atau dalam hal ini pendapatan Kalurahan adalah merupakan semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Uraian diatas juga perkiraan pendapatan kalurahan yang kemudian disusun berdasarkan realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya.

Dalam kebijakan belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja kalurahan yang kemudian diklasifikasikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Diatas terlihat bahwa dalam pendapatan tentunya pasti ada pengeluaran, hal ini merupakan wujud dari pengembangan pembangunan suatu Kalurahan terhadap kondisi kalurahan yang kemudian harus tetap dikawal dalam setiap fenomena yang terjadi dalam suatu kalurahan. Anggaran-anggaran tersebut merupakan salah satu solusi dari setiap permasalahan yang terjadi, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa anggaran juga sebagai *support* atau sumber utama dalam penyelesaian setiap permasalahan keadaan sosial lingkungan dan pemerintahan, dengan demikian anggaran tersebut dalam direalisasikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan diuraikan bagaimana belanja modal yang kemudian digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	9.345.941.491,00
2.	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	5.328.519.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.161.189.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	1.579.840.500,00
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	279.000.000,00
TOTAL BELANJA		17.694.489.000,00

Sumber: Dok. RPKal 2023

Terlihat bahwa antara perkiraan pendapatan dan perkiraan belanja terdapat kesenjangan dimana perkiraan belanja yang mempunyai dana begitu signifikan besarnya yang terlihat pada uraian diatas.

Akan tetapi hal ini mendapat solusi bahwsannya Pemerintah Kalurahan Srimulyo mempunyai prioritas program dalam kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini pada tahun 2022 adalah pembangunan ruko milik Kalurahan yang sudah beberapa tahun sebelumnya diusulkan, dengan harapan bahwa nanti kedepannya akan menambah Pendapatan Asli Kalurahan dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini prioritas program melalui kegiatan dan anggaran dikelola Kalurahan merupakan bentuk penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil

masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes.

g. Keadaan Sosial

Beberapa mata pencaharian penduduk Kalurahan Srimulyo bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, akan tetapi di dominasi oleh banyaknya Buruh Harian Lepas. Masyarakat Kalurahan Srimulyo mengandalkan lahan pertanian dan perkebunan untuk melakukan kegiatan bertani dan memanen hasil pertanian mereka dan masalah yang sering muncul yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pembangunan khususnya di ekonomi produktif.

Jumlah Penduduk Miskin 1.233 orang/526 KK Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Srimulyo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Srimulyo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat angka kemiskinan tersebut memicu pemerintah dan warga srimulyo untuk melakukan gebrakan baru melalui pembangunan desa

wisata atas potensi wilayah yang dimiliki. Selain itu adanya organisasi lembaga masyarakat di Kalurahan Srimulyo tentu merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat, berikut merupakan lembaga-lembaga sosial yang ada di Kalurahan Srimulyo.

1. LPMD

LPMD adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desayang juga ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Jumlah pengurus 14 orang.

Peran LPMD yang optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa (mudes dan musrenbangdes) serta dalam mengawal usulan perencanaan pembangunan desa agar sesuai usulan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pro swadaya pro partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa dan musrenbangdes sangat penting.

2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

PKK merupakan arena bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya. Melalui kelompok ini perempuan didorong untuk mengekspresikan kemampuannya memimpin sebuah organisasi, menjalin relasi dengan sesama anggota atau diluar anggota, bertukar ide serta berupaya mensukseskan tujuan-tujuan yang telah disepakati. Dengan jumlah pengurus 19 Orang, anggota 27 Orang.

3. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang hadir sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan mendayagunakan semua potensi yang ada. Di Kalurahan Srimulyo. Dengan jumlah pengurus 17 Orang, anggota, 63 Orang, jenis kegiatan; pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi kreatif, kaderisasi, usaha lingkungan hidup dan pariwisata, kerja sama antar lembaga, Olah raga dan seni budaya, pemberdayaan perempuan.

4. Pokdarwis Gerbang Madu

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gerbang Madu Kalurahan Srimulyo merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Pokdarwis Srimulyo berperan serta bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata desa dan mensukseskan pembangunan pariwisata yang ada di Kaluraha Srimulyo. Dengan jumlah pengurus 5 orang.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kalurahan Srimulyo juga memiliki Badan Usahnya sendiri. Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Kalurahan Srimulyo, dengan nama BUMDes “Srimulyo Artha Mandiri” yang keberadaannya lahir Keputusan Lurah Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2016 tentang penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Periode 2016-2019. “Srimulyo ARTHA MANDIRI” ini, diawali dengan unit usaha yang bergerak pada simpan pinjam kepada seluruh perangkat desa Srimulyo. Unit Simpan Pinjam

ini kemudian disebut sebagai BANK DESA. Seiring berjalannya waktu, BUMDes Srimulyo sudah mengembangkan kegiatan usahanya dalam unit usaha toko tanpa awak, pengelolaan sampah, serta *catering* dan *snack*. Dengan jumlah pengurus 6 orang.

h. Sistem informasi Kalurahan Srimulyo

Kalurahan Srimulyo dalam perkembangannya terhadap penerapan digital *government* telah melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat dengan menginisiasikan beberapa metode untuk mempermudah bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah Desa. Metode yang dikembangkan tentunya berbasis online atau dengan memanfaatkan perkembangan teknologi guna mempermudah implementasi daripada program *smart village* tersebut, hal ini tentunya diterapkan oleh Pemerintah Desa bukan semata hanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok, melainkan metode dalam bentuk aplikasi pelayanan ini dijadikan inovasi bagi kepentingan umum dalam hal ini masyarakat sebagai subjek dalam perkembangan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Adapun beberapa aplikasi yang kemudian dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan Srimulyo sampai pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1) e-LASTRI (Layanan Administrasi Tanpa Antri)

e-Layanan Administrasi Tanpa Antri atau e-LASTRI adalah kemudahan pelayanan administrasi desa yang diberikan kepada warga masyarakat tanpa harus hadir berdesak-desakan di desa. Masyarakat cukup mengirim capture foto dokumen pendukung dan dikirimkan ke call center desa yang dapat diakses dalam nomor berikut; (08132 6666 021). Apabila persuratan sudah siap, operator akan memberikan konfirmasi pengambilan

kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengambil dokumen tersebut dengan menunjukkan dokumen asli.

Layanan ini memberikan kemudahan pelayanan khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi di desa sehingga dapat dilayani dengan mudah dan efektif. Dalam perkembangannya, saat ini tersedia pula e-LASTRI dalam aplikasi berbasis android yang dapat didownload di *Google Play Store*.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa hadirnya aplikasi ini sebagai bentuk generalisasi dari *smart village* melalui *digital government* oleh Pemerintah Kalurahan Srimulyo, yang kemudian dalam perkembangannya terlihat bahwa ada hal yang memiliki kecenderungan bahwa masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses pelayanan, karena pada hakekatnya hadirnya metode ini tidak membangun suatu *gab* antara Pemerintah Desa dan masyarakat melainkan mempermudah masyarakat dalam menjangkau berbagai informasi yang terkait penyelenggaraan pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa dan kemudian yang berkaitan dengan data kependudukan dan kebutuhan lainnya.

Terlihat bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Desa kerap kali mendapatkan berbagai masukan dalam bentuk aspirasi masyarakat desa yang tentunya hal ini dapat membangun perkembangan Kalurahan Srimulyo, artinya bahwa metode-metode seperti ini sudah dapat dikelola oleh masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan perkembangan atas pengalaman yang telah dihadapkan oleh masyarakat desa dasar yang kemudian diwarnai dengan masifnya penggunaan teknologi.

2) e-SAMBAT (Saluran Aspirasi Masyarakat Berbasis IT)

e-Saluran Aspirasi Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi atau e-SAMBAT adalah layanan portal pengaduan dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa Srimulyo bagi warga masyarakat yang ingin memberikan laporan, pengaduan, saran dan kritik terkait segala hal yang terjadi di lingkungannya. Layanan ini tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat di download di *Google Play Store*. Selain melalui aplikasi e-SAMBAT, pengaduan dapat dilakukan pula melalui media-media sebagai berikut:

- a. SMS/WA/Telepon di Call Center 08132 6666 021
- b. Kotak surat di depan ruang pelayanan
- c. Email desa.srimulyo@bantulkab.go.id
- d. Kolom komentar di website srimulyo-bantul.desa.id atau srimulyo.bantulkab.go.id

Terlihat bahwa dari uraian diatas begitu jelas dan bahkan sangat konkrit, bahwasannya Pemerintah Kalurahan Srimulyo dalam pengembangan *smart village* atau desa cerdas sudah membuat sebuah keputusan akan bagaimana masyarakat desa dapat memberikan pengaduan-pengaduan atau aspirasi lain yang berkaitan dengan pengembangan desa dan bahkan dalam hal ini masyarakat desa dapat memberikan saran melalui media tersebut untuk bagaimana memberikan masukan-masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah menganggap bahwa desa yang cerdas tentunya elemen-elemen yang mendukung pembangunan juga harus cerdas dalam menentukan suatu kebijakan dalam pengembangan desa, peris disini terlihat bahwa Pemerintah Kalurahan Srimulyo mengedepankan skema pemerintahan desa transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena masyarakat

menganggap bahwa ruang-ruang terbuka seperti ini yang kemudian diharapkan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspira-aspiranya, terbukanya suatu Pemerintahan Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri untuk mengelola serta mengatur desanya keterlibatan pihak masyarakat dan pihak lain adalah bentuk pengelolaan Kalurahan Srimulyo secara partisipatif dan akuntabilitas.

3) Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan (SIAP)

Sistem Informasi Administrasi Dan Pelayanan (SIAP) merupakan aplikasi yang persis dengan aplikasi e-LASTRI, karena aplikasi ini mempunyai tujuan untuk bagaimana kemudian segala bentuk informasi dan administrasi dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi tersebut. Layanan ini memberikan kemudahan pelayanan khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi di desa sehingga dapat dilayani dengan mudah dan efektif.

Akan tetapi dalam perkembangannya Pemerintah Kalurahan Srimulyo menemukan sebuah inovasi baru terkait pelayanan prima bagi masyarakat yaitu dengan menghadirkan suatu layanan baru yang kemudian dinamai dengan e-LASTRI (Layanan Administrasi Tanpa Antri), aplikasi ini sebagai wujud dari aplikasi SIAP yang kemudian di generalisasikan secara sistematis dalam e-LASTRI. Dilihat dari perkembangannya metode-metode ini sangat berpengaruh positif terhadap pelayanan bagi masyarakat yang muda akses dan cepatt penanganannya, yang kemudian dalam istilah Pemerintah Kalurahan Srimulyo dalam pelayanannya adalah pelayanan “3 menit beres”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa wajah pelayanan Kalurahan Srimulyi merupakan pelayanan prima karena sebelum diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pemerintah Desa Srimulyo telah berinisiatif untuk melakukan terobosan dalam bidang pelayanan di desa sehingga pelayanan terasa dekat, terbuka, mudah dan efektif diantaranya:

- a. Mempertegas **jam pelayanan** tepat pukul 08.00-16.00.
- b. **Pelayanan Ekstra** tiap Sabtu (09.00-12.00) khusus administrasi pertanahan.
- c. **Sistem Pelayanan Satu Pintu.**
- d. Menyusun **Standar Operasional Prosedur (SOP)** terkait Pelayanan.
- e. Membuat **Sistem Antrian Digital.**
- f. Pelayanan dilakukan dengan **SID** sehingga sangat cepat bahkan dengan jargon "**3 M3NIT BERES!**".
- g. Terdapat **Play Ground** - Pojok Bermain Anak.
- h. Terdapat **Ruang Laktasi** - Pojok Menyusui.
- i. Memiliki layanan online **e-LASTRI** (e-Layanan Administrasi Tanpa Antri).
- j. Memiliki layanan pengaduan **e-SAMBAT** (e-Saluran Aspirasi Berbasis Teknologi Informasi).

Diatas merupakan sistem pelayanan yang memuat informasi yang berkaitan dengan administrasi Kalurahan Srimulyo, terlihat bahwa pengembangan melalui pemanfaatan teknologi di Kalurahan Srimulyo begitu masih dan komprehensif. Melalui media akses tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima serta memberikan aspirasi

terhadap Pemerintah Kalurahan Srimulyo, kecenderungan ini kemudian menjadi wujud nyata pembangunan desa melalui pengelolaan yang berbasis digital sebagai terobosan dari *smart village* yang menginginka desa-desa di indonesia lebih cerdas dalam mengelola rumah tangganya sendiri, dengan perkembangan teknologi adalah salah satu bagian dari bagaimana pemerintah desa membuat sebuah inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal memang bukan suatu hal yang mudah bagi masyarakat maupu Pemerintah Desa, akan tetapi dalam kehadiran perkembangan membuat kita untuk semakin mendorong kemampuan dalam mengelola perkembangan ini sebaik mungkin karena pada hakikatnya zaman terus berubah, dan hal ini tidak bisa ditentang akan tetapi bagaimana skema dalam menjalankan pemerintahan desa yang dapat dikelola sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan, perubahan-perubahan yang akan terjadi baik secara karakteristik masyarakat atau budaya ini nantinya sebagai bentuk wujud nyata bahwa perubahan itu selalu datang sebagai bentuk perkembangan zaman.

Dengan adanya pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa Pemeritah Kalurahan Srimulyo dengan penerapan *smart village* sebagai bentuk generalisasi serta manifestasi perkembangan teknologi dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan inovasi layanan masyarakat berbasis IT, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menjalan roda penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga Tata kelola atau *governance* Pemerintah Kalurahan Srimulyo terlihat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan elemen-elemen tersebut. Dengan melihat indikator keberhasilan *smart village* di dasari pada *sinergitas* atau kolaborasi pengelolaan Kalurahan yang begitu prima baik terhadap pelayanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka peneliti mendapatkan informasi dari informan yang berkaitan dengan analisis tentang pelaksanaan program *smart village* dalam Pengembangan Desa secara melalui pemanfaatan teknologi digital. Data yang diperoleh peneliti melalui proses penelitian yang berlangsung disesuaikan dengan kebutuhan atas metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta triangulasi dalam penelitian ini, dijelaskan sebenar-benarnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan.

Berikut ini peneliti akan menarik kesimpulan tentang pelaksanaan program *smart village* dalam roda pemerintahan desa yang dikelola serta melakukan pengembangan informasi serta sumber daya-sumber daya lainnya yang hal tersebut wujud dari pengimplementasian *smart village* di Kalurahan Srimulyo adalah sebagai berikut.

1. **Pertama**, pelaksanaan *smart village* melalui *collaborative governance* dalam *smart government* dalam roda Pemerintahan Desa Srimulyo telah dielaborasi bagaimana proses dari awal dalam merancang *smart village* hingga pada tahap pengrealisasian program melalui mekanisme dengan mereformasi birokrasi dengan menggagas produk-produk atau inovasi informasi yang administratif, yang dimana Pemerintah Kalurahan Srimulyo merancang *smart village* dengan memanfaatkan perkembangan era digital. Inovasi yang dihadirkan kemudian diterapkan dalam roda pemerintahan desa yang lebih cenderung merancang pelayanan desa yang prima. Akses yang dihasilkan dari produk atau inovasi ini

sangat membantu pelayanan bagi masyarakat dalam menerima informasi dan juga akses untuk kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang kemudian hal serupa bagaimana Pemerintah Desa dalam kebijakannya bahwa inovasi pelayanan ini juga didesain untuk bagaimana selanjutnya masyarakat memberikan aspirasi terhadap Pemerintah Desa melalui masukan dan saran terhadap Pemerintah Desa dalam media yang telah disediakan secara digital (online).

2. **Kedua**, pelaksanaan *smart village* melalui *collaborative governance* dalam *smart community* dengan metode *collaborative governance* terlihat berjalan secara substansial, karena kolaborasi ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam wujud disiplin *smart community* sebagai tombak dasar untuk kemudian pemerintah desa dapat menggagas kebijakan-kebijakan yang mampu membawa suatu perubahan dalam masyarakat, nantinya kebijakan ini akan menjadi indikator bagaimana pemerintah desa dapat mengelola pemerintahan maksimal serta dapat mengelola sumber daya-sumber daya ada sebagai wujud pemerataan pembangunan yang cerdas melalui dasar pemikiran yaitu pengimplementasian *smart village* dalam pengembangan kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang di hasilkan melalui pengamatan kondisi lingkungan, agar hal ini dapat mendukung berjalannya roda pemerintahan desa.
3. **Ketiga**, dapat diambil suatu benang merah dari uraian terkait paparan mengenai *smart village* dalam wujud *collaborative governance* melalui *smart environment* diatas tersebut adalah terlihat ada suatu pelaksanaan serta pengelolaan kawasan potensi wisata serta potensi sumber daya lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah dalam hal ini melakukan suatu pemberdayaan keadaan sosial dan lingkungan masyarakat desa setelah terpetakan secara

komprehensif dengan melihat potensi yang ada, dengan langkah berikutnya yakni memberdayakan masyarakat untuk konservasi. Karena tidak ada artinya, potensi yang dimiliki hanya dibiarkan saja, sehingga perlu kekuatan dan kerja-kerja kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui pokdarwis maupun BUM Desa, maka *governansi* memerlukan pengorganisaian aktor untuk mengatur, mengurus, mengelola, untuk mencapai pembangunan, menumbuhkembangkan daya ungkit pendapatan desa serta kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga dengan *smart village* proses pengembangan dapat dilakukan dengan maksimal melalui pemanfaatan teknologi digital agar supaya akses wisata dapat dilihat langsung dalam media online Kalurahan Srimulyo.

B. Saran

Desa membangun merupakan paradigma yang memungkinkan warga desa menentukan sendiri prioritas dan visi pembangunannya sendiri karena keputusannya dilakukan dalam Musyawarah Desa/ Kalurahan. Dengan demikian pandangan-pandangan sebagai romantisme lama harus diubah dengan pandangan yang new mind, revisionis. Berani melakukan kolaborasi maupun kerjasama untuk membangun desa sendiri baik yang sifatnya antar desa maupun dengan pihak lain. Pemerintah desa harus mampu membaca kondisi strategis wilayahnya sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat atau wilayahnya, dengan begitu akan terjadi inlinisasi antara perencanaan dan pengrealisasian.

Pemerintah Desa, masyarakat, dan *stakeholders* harus melakukan suatu komunikasi yang efektif (sosialiasi, koordinasi dan komunikasi), umpan balik yang cepat dengan indikator keterlibatan dan respon masyarakat dan *stakholders*, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Pemerintah Kalurahan dalam membuat

program kegiatan untuk mengeneralisasikan *smart village* dan kreativitas masyarakat yang terus membuka ruang kebebasan untuk berkreasi.

Berdasarkan hal tersebut maka, perencanaan merupakan akar dari sebuah pembangunan yang akan diimplementasikan. Maka, perlu melakukan perencanaan yang sesuai dengan keadaan di daerah tersebut. Sebagaimana fokus dalam pemulihan ekonomi Indonesia adalah ketahanan pangan, UMKM dan Pariwisata yang menjadi prioritas saat ini sebagai kunci pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Sehingga atas dasar hal tersebut desa-desa mampu melakukan perubahan dan pembaharuan, untuk melakukan perencanaan yang memaut pemulihan ekonomi nasional. Desa pun dapat menyerap anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang menganggur karena perencanaan dan penganggaran harus sinkron.

DAFTAR PUSTAKA

- Assani, S., Wahyu, A., Amil, A., Ahmadi, M., Ali, M., & Amin, M. Al. (n.d.). E-Commerce Desa Dalam Upaya Menuju Smart Village ; Studi Analisa Dan Perancangan. 4(3), 31–40.
- Cahyono, B. N., Nugroho, A., & Dewi, A. R. (2020). DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAP (Studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul) dan diakses sesuai kebutuhan . Basis data ini juga akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam entry data pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan proses pencetakan sertipikat . 3(1).
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Hadian, N., & Susanto, T. D. (2022). Pengembangan Model Smart Village Indonesia : Systematic Literature Review. 04.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. 21(1), 1–16.
- Ii, B. A. B. (n.d.). Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif . Yogyakarta: UGM Press. Hal 1. 25. 25–45.
- Ii, B. A. B., & Penelitian, D. O. (2017). No Title.
- ikram Ikram, M. (2020). Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-110.
- Maryam, N. S. (2016). JIPSi. VI(1), 1–18.
- Miles dan Huberman dalam Sugiyono. (n.d.). Metode Penyajian Data. 2011, 341.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi ”. *Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya.*
- Pamekasan, K. (2020). PENERAPAN APLIKASI PELAYANAN DESA BERBASIS MOBILE DENGAN KONSEP SMART VILLAGE DI DESA PEGANTENAN , KECAMATAN. 4(November), 646–652.

- Permana, Y. (n.d.). PERANCANGAN SMART VILLAGE SEBAGAI LOCAL GENIUS.
- Rachmawati, R. (2018). PENGEMBANGAN SMART VILLAGE UNTUK. 01(02), 12–18.
- Rahadiano, A. I., Slamet Riyadi, M. S. I., AK, C., & Riyadi Nugroho, M. M. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK ETHOS ON WORK MOTIVATION AND EMPLOYEES PERFORMANCE OF UPT SURABAYA ROAD AND BRIDGE MANAGEMEN.
- Saidah, N., Khasanah, L., & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village. 6(2), 123–135.
- Sulistiani, H., Saputra, A., Isnain, A. R., Darwis, D., Rahmanto, Y., Nuriansah, A., & Akbar, A. (2022). VILLAGE GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN DESA DI PEKON SUKANEGERI JAYA. 3(1), 94–100.
- Teknologi, J., Jtsi, I., Saputra, M. A., Isnain, A. R., Informasi, S., Teknik, F., & Indonesia, U. T. (2021). PENERAPAN SMART VILLAGE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN METODE WEB ENGINEERING (Studi Kasus : Desa Sukanegeri Jaya). 2(3), 49–55.
- Wisata, D. (2019). J p a l g. 3(1), 18–28.

PEDOMAN WAWANCARA

“Governansi Program *Smart Village* di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”

A. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan/jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. *Smart Government*

- a. Bagaimana perwujudan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa yang berbasis teknologi?
- b. Bagaimana keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?
- c. Seperti apa proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui model penerapan digital government?
- d. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat untuk mewujudkan arah program yang berbasis teknologi?
- e. Bagaimana Pemerintah Desa merumuskan program dengan meningkatkan pemberdayaan (SDM) terhadap masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa?

2. *Smart Community*

- a. Seperti apa partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berbasis teknologi?
- b. Bagaimana penggunaan adat, budaya, sosial dan lingkungan secara berkeseluruhan, berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam perwujudan program *smart village*?
- c. Bagaimana pola relasi kelembagaan masyarakat terhadap respon program kebijakan *smart village*?

- d. Bagaimana kedudukan dan peran masyarakat desa dalam pengembangan program *smart village*?

3. *Smart Environment*

- a. Bagaimana pemerintah desa dan masyarakat dalam melestarikan adat, budaya, sosial serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang berbasis teknologi?
- b. Bagaimana proses struktur sosial dan jaringan kemasyarakatan melalui penerapan program *smart village*?
- c. Bagaimana keterjalinan dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan berbasis teknologi informasi?
- d. Seperti apa tindakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan lingkungan sosial maupun alam?

Dokumen Inovasi Sistem Informasi Pelayanan Desa

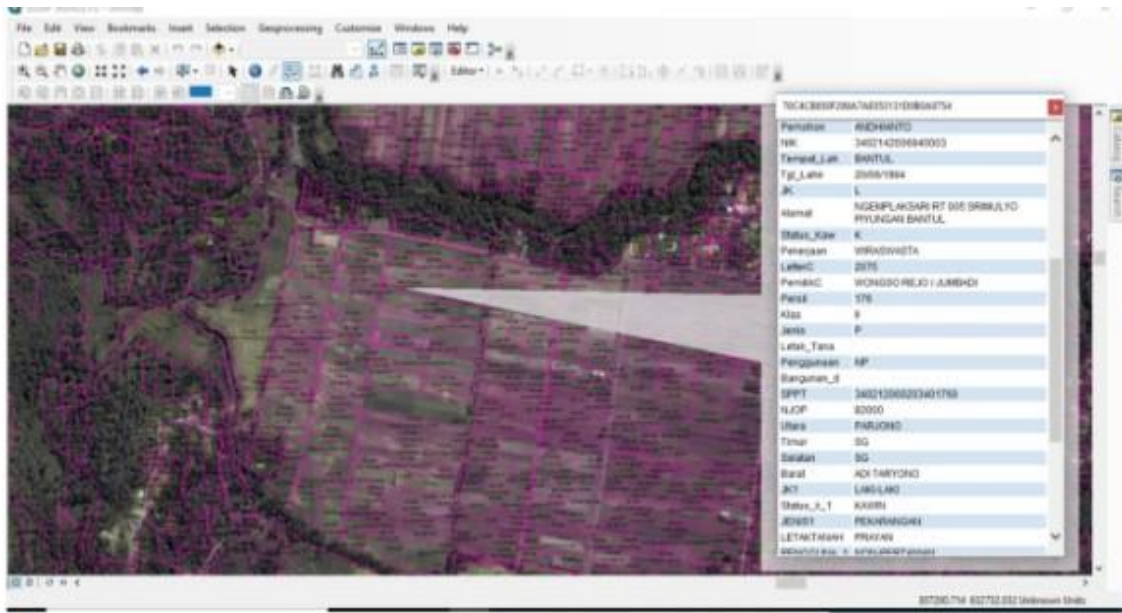
TUTORIAL APLIKASI
e-LASTRI
(LAYANAN ADMINISTRASI TANPA ANTRI)



Langkah-langkah :

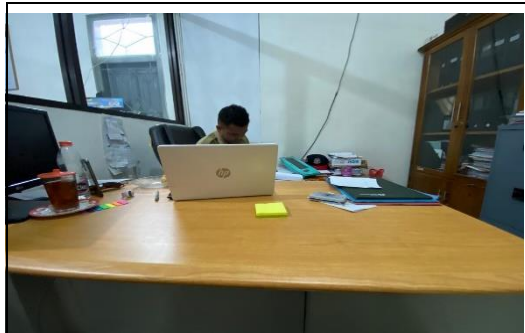
1. Download kemudian instal aplikasi e-LASTRI yang sudah tersedia di Playstore
2. Buka aplikasi e-LASTRI yang sudah terinstal
3. Masukan "NAMA, NIK dan NO. TELP" Anda lalu klik "MASUK"
4. Pilih surat yang anda butuhkan dengan cara Klik " Gambar Surat". Apabila jenis surat yang Anda butuhkan tidak tercantum maka klik tombol " MANUAL"
5. Tulis dan isi blangko surat yang sudah Anda pilih dengan lengkap, jika sudah klik " KIRIM"





Dokumen Masterplan Reast Area Wisata Srimulyo





Wawancara pemerintah desa di kantor Kalurahan, wawancara dilakukan berdasarkan metode wawancara terkait topik yang diteliti. Pak wajiran sebagai Lurah serta kepala pemerintahan desa yang telah merancang bagaimana program *smart village* dapat diimplementasikan guna mempermudah segala bentuk akses infotmasi masyarakat dalam pelayanan admnistrasi dan inovasi berdasarkan potensi SDM yang tersedia.



Wawancara bersama masyarakat yang merupakan pelaku usaha dan juga pihak swasta di kediamannya di padukuhan ngelosari, wawancara bersama pak bambang terkait topik penelitian yang diteliti. Pak bambang merupakan salah satu warga yang terlibat aktif dalam agenda pertemuan di Kalurahan dan aktif bekerja sama dengan pelaku UMKM serta figur yang salah satunya memfasilitasi masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat Srimulyo.



Wawancara bersama masyarakat yang merupakan warga asli Srimulyo di kediamannya di padukuhan jasem, wawancara bersama pak Nurdiyanto terkait topik penelitian yang akan diteliti. Pak Nurdiyanto adalah salah satu masyarakat yang sangat merasakan bagaimana program *smart village* dapat menjadi jawaban atas segala bentuk kekurangan dan keterbatasan akses informasi selama ini yang dirasakan. Pak Nurdiyanto mengatakan dengan singkat bahwa “*smart village* sangat membantu kami masyarakat desa”.



Wawancara bersama pak Carik sebagai Pemerintah Desa di Kantor Kalurahan. Pak Nurjayanto dalam wawancara terkait topik yang diteliti. Pak carik mengatakan bahwa pemerintah desa menggagas suatu kebijakan berdasarkan pemetaan secara optimal yang sudah dilakukan, sehingga setelah pemetaan dilakukan *smart village* diimplementasikan di berbagai lini. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam segala upaya pembangunan yang maksimal.



Wawancara bersama pak sugeng sebagai tata laksana pemerintahan desa. pak sugeng dalam wawancara terkait topik yang akan diteliti tersebut berpendapat bahwa, memang kebijakan ini dalam pelaksanaannya tidak dalam bentuk fisik akan tetapi hal ini dampaknya dirasakan oleh masyarakat, karena tujuan awal kami yaitu masyarakat dipermudah dan pemerintah desa lebih transparansi.